

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh :

MOCH LAILUL IBADIL HADI

NIM: T20151333

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

JULI 2019

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

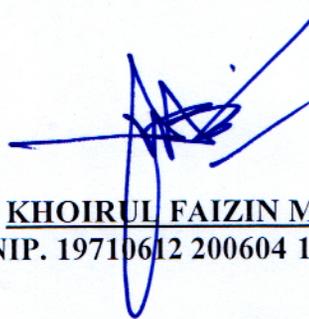
SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Neger Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh :

MOCH LAILUL IBADIL HADI
NIM: T20151333

Disetujui Pembimbing



KHOIRUL FAIZIN M.Ag
NIP. 19710612 200604 1 001

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH
DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 197209182000501 1003

Sekretaris



Nur Ittihadatul Ummah, S.Sos.I., M.Pd.I
NUP: 20160364

Anggota :

1. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Hafidz, S.Ag. M.Hum.



Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I
NIP. 19640511/19993 2 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Surat Al-Hujurat. 13)¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an., 49:31.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut Asma Allah yang maha pengasih lagi Maha penyayang, puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam, atas ridho dan rahmat-Nya saya sampai pada titik ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Sayyidul Kainan, Rajanya manusia Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi ini saya curahkan dan persembahkan untuk manusia manusia yang paling penting bagi saya di Alam semesta ini.

1. Abah tercinta, sebagai pahlawan pertama, dan umi tercinta sebagai cinta pertama. perjuangan, pengorbanan, beliau berdua untuk menjadikan saya sebagai insan yang terdidik sungguh luar biasa.
2. Saudara-saudara kandungku Ahmad liwaul Huda dan Moch Sofyan Hadi yang selalu mensupport dan mendukung untuk menyelesaikan karya ini.
3. Sahabat-sahabat senasib sepenanggungan seperjuangan keluarga gokil,
4. Teman-teman FTIK PAI A9 angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang di bangku perkuliahan, melewati setiap proses diskusi, penulisan makalah, dan kebersamaan-kebersamaan lain yang tidak bisa untuk dilupakan.
5. Almamater kebanggaan. Institut Agama Islam Negeri Jember

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya , perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak . oleh karena itu penulis sampaikan banyak-banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Abah tercinta, sebagai pahlawan pertama, dan umi tercinta sebagai cinta pertama. perjuangan, pengorbanan, beliau berdua untuk menjadikan saya sebagai insan yang terdidik sungguh luar biasa.
2. Saudara-saudara kandungku Ahmad liwaul Huda dan Moch Sofyan Hadi yang selalu mensupport dan mendukung untuk menyelesaikan karya ini.
3. Sahabat-sahabat senasib sepenanggungan seperjuangan keluarga gokil,
4. Teman-teman FTIK PAI A9 angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang di bangku perkuliahan, melewati setiap proses diskusi, penulisan makalah, dan kebersamaan-kebersamaan lain yang tidak bisa untuk dilupakan.
5. Almamater kebanggaan. Institut Agama Islam Negeri Jember
Penulis berharap bisa membalas semua kebaikan kalian serta mendoakan semoga segala kebaiakan yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Demikian kata pengantar, semoga skripsi ini dapat memperluas khazanah keilmuan di dalam kajian dan diskusi serta menambah referensi bagi mereka yang membutuhkannya, Aamiin ya rabbal alamin

Jember, 11 September 2019

Penulis.

MOCH LAILUL IBADIL HADI
T20151333



ABSTRAK

Moch Lailul Ibadil Hadi, 2019: Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Perspektif Piagam Madinah dalam Pendidikan Nasional.

Latar belakang penelitian ini adalah melihat realita kemajemukan yang ada di Madinah dapat terorganisir dan dapat dikelola dengan baik berkat adanya konstitusi Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah terhadap Masyarakat Madinah. Untuk itu bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada di dalam Piagam Madinah dapat diimplementasikan dan diambil kembali ibrahnya di dalam Pendidikan Nasional.

Fokus penelitian ini yaitu (1). apa nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah dalam pendidikan Nasional?, (2) bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah dalam pendidikan Nasional?, dan tujuan penelitian ini (1). mendeskripsikan apa saja implementasi nilai-nilai pendidikan multikulturalisme perspektif Piagam Madinah pada pendidikan Nasional dan (2). mendeskripsikan implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah dalam pendidikan Nasional

Untuk melakukan penelitian yang bersifat history (sejarah) tersebut, maka peneliti memilih metode penelitian *library research*, atau studi kepustakaan. Dimana peneliti mengumpulkan data melalui bahan-bahan yang tersedia berupa buku, arsip, jurnal maupun dokumen-dokumen lain yang dapat menunjang penelitian. Terdapat dua sumber data dalam penelitian kepustakaan, yakni sumber data primer dan sekunder, sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan lain lain. Sekiranya data terkumpul kemudian peneliti menganalisis semua bahan dari sumber data primer dan sekunder untuk dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Jika sudah selesai di analisis maka diuji keabsahannya melalui teknik induktif, deduktif, komparatif dan interpretative.

Hasil dalam penelitian ini (1). Terdapat tiga nilai pendidikan multikultural di dalam Piagam Madinah, yaitu demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan pluralisme. (2) implementasi dari nilai-nilai tersebut di dalam pendidikan nasional ialah berupa demokratisasi pendidikan, pendidikan humanis, dan pendidikan pluralisme.

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	28
A. Kajian Terdahulu	28
B. Kajian teori.....	34
BAB III Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Piagam Madinah	60
1. Kota Madinah.....	60
2. Kondisi sosial politik masyarakat Madinah pra Hijrah.....	63
3. Hijrahnya Rasulullah.....	68
4. Isi Piagam Madinah.....	77
5. Nilai-nilai pendidikan multikultural Piagam Madinah	93
BAB IV Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Piagam Madinah Dalam Pendidikan Nasional.....	99
A. Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Nasional	99

B. Porsi dan urgensi pendidikan multikultural dalam pendidikan Nasional	103
C. Rekonstruksionalisme Pendidikan.....	108
D. Implementasi Pendidikan Multikultural Pigam Madinah dalam pendidikan Nasional.....	108
BAB IV PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keragaman telah menjadi bagian dari sejarah dan realitas kehidupan kemanusiaan, sehingga ia merupakan fenomena alamiah yang eksistensinya tidak dapat dipungkiri, untuk itu Al-Qur'an secara teoritis memberikan pedoman bagi umat muslim tentang bagaimana dalam menanggapi keragaman tersebut sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Al-Qur'an surat al-Hujuraat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antarmanusia yang beragama. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada semua jenis manusia. Kata pengantar pada awal ayat tersebut bersifat general kepada semua manusia, terlepas manusia tersebut mukmin atau tidak, berasal dari suku dan alatar belakang kehidupan semuanya

terlindas dalam ayat tersebut, pendek kata ayat tersebut mengumumkan bahwasanya segala keragaman yang ada di muka bumi ini adalah keniscayaan dan keagungan Allah SWT, baik itu berbeda jenis kelamin, suku, budaya, ras atau apapun. Oleh karenanya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertaqwa kepadaNya. Dalam ayat yang lain juga ditegaskan tentang kemajemukan merupakan pandangan dan cara hidup diantara manusia yang tidak perlu menimbulkan kegusaran, tetapi hendaknya dipahami sebagai pangkal tolak sumber motivasi untuk berlomba-lomba dalam menuju kebaikan. Karena hanya Tuhanlah yang akan menerangkan mengapa manusia berbeda, nanti ketika manusia kembali kepadaNya²

Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dan contoh terbaik bagi umat muslim, telah mempraktekkan dan mengimpementasikan ayat tersebut kedalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika beliau hijrah ke Madinah dan menemukan realitas kondisi masyarakat Madinah saat itu sedang terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa, pasalnya pertempuran antar sesama suku sudah terjadi sejak ratusan tahun belum juga berakhir, sehingga beliau mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah kontrak sosial untuk menjaga keharmonisan dalam keragaman yang bernama Piagam Madinah.

Piagam Madinah terbentuk atas dasar perbedaan Agama, suku, dan kebudayaan. Dikatakan bahwa dahulu Pergulatan kekuasaan antar suku dan

² Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme Dan Demokrasi* (Malang, UMM Press, 2001), 2.

klan di Madinah sudah terjadi ratusan tahun, peperangan yang meletihkan itu belum juga sampai tentang pada siapa atau klan apa yang dapat menguasai Yastrib dan memimpin daerah itu, sehingga biasanya tentu saja semua berebut untuk menjadi yang terkuat masa itu. sehingga Hijrah Nabi Muhammad SAW. ke Madinah membawa angin segar bagi kehidupan masyarakat di sana. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru.³

Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar *pertama*, pembangunan masjid. Dasar *kedua*, memperkokoh *ukhuwah Islamiyah*. Dasar *ketiga*, menjaga persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Pada awal kedatangannya, di dasari pada realita majemuknya masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW. membuat piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya.⁴

Piagam Madinah merupakan dokumen yang cukup tua, baik dalam sejarah konstitusi dunia maupun sejarah peradaban Islam. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan masyarakat Madinah, serta menyatukan umat islam Pendatang dari Mekkah dengan penduduk asli Madinah secara

³ Muhammad Jamal al-Din Surur, *Qiyam al-Dawlah al-'Arabiyyah al-Islamiyah fi Hayati Muhammad SAW* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1977), 95.

⁴ Ibid., 95.

umum. Dan karena kesatuan bangsa ini (penduduk Mekkah dan Madinah) lahirlah masyarakat (*ummah*) Madinah.⁵

Keotentikan ide-ide dan gagasan pendidikan multikultural yang terkandung dalam Piagam Madinah menjadikan banyak para pemikir dan ilmuwan, baik dari kalangan muslim, barat, dan intelektual Indonesia khususnya, tertarik untuk mengkajinya. Ketertarikan ini bermula dari anggapan bahwa Piagam Madinah mengandung ide-ide dan gagasan tersembunyi, yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Islamiyah dan politik Rasulullah.⁶

Nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada di dalam Piagam Madinah tersebut amat sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur yang paling penting di dalam Piagam Madinah adalah terbentuknya masyarakat yang pluralis dan mampu hidup berdampingan walau berbeda. misalnya pada awalnya bersitegang dengan perbedaan tersebut sehingga menimbulkan peperangan antar suku yang tidak berujung pada kesepakatan damai atau gencatan senjata. Tapi setelah Piagam Madinah dideklarasikan rasisme antar suku mulai berkurang, berganti dengan sikap toleransi dan tenggang rasa antar sesama penduduk Madinah. Atas dasar itulah mengapa kajian Piagam Madinah ditinjau dari segi pendidikan multikultural yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW sangat urgen untuk kembali diambil *ibrah* pendidikannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴, lebih-lebih

⁵ Ali Romadhoni, *Piagam Madinah bukan konstitusi negara Islam* (Depok: liberatur Nusantara, 2014), vii.

⁶ *Ibid.*,vii.

kepada masyarakat Indonesia yang *pre-dominantly* adalah Masyarakat yang plural, terdiri dari berbagai suku bangsa dan beragam kepercayaan.

Sebagaimana Madinah, Indonesia sendiri merupakan salah satu tempat di dunia dimana bisa ditemukan berbagai macam suku, agama, dan ras berkumpul disebuah hamparan pulau-pulau indah dan menakjubkan. Keberagaman ini seakan menjadi pembeda negara Indonesia dengan negara-negara lain yang notabene kebaragamannya tak seberagam Indonesia.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multietnik, multikultural, multiaksara, dan multibahasa. Setiap suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan mempunyai kekayaan pemikiran, sikap, dan perilaku yang tertuang dalam wujud kebudayaan.

Oleh karena itu tak ayal jika Indonesia memiliki masyarakat dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks, sebagai negara multietnik, Indonesia didiami oleh sekitar 1028 etnik menurut BPS yang menggunakan bahasa local atau bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Jumlah bahasa mencapai sekitar 764 bahasa. Kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut secara fakta deskriptif dapat diterima, namun secara perspektif dalam beberapa kasus, kemajemukan tersebut seringkali dianggap sebagai factor penyulut yang serius, yakni rentan sekali terhadap konflik horizontal, sebagaimana pernah berkali kali terjadi konflik antar kelompok di berbagai daerah di Indonesia, secara umum, konflik horizontal mendorong banyak pihak untuk semakin cermat memahami konteks antara

kelompok relasi di Indonesia. Karena sesungguhnya, relasi yang positif dalam masyarakat Indonesia sangatlah penting untuk membangun harmoni social, namun kenyataannya, relasi antar kelompok tidaklah selalu terbangun indah mempesona. Berbagai persoalan kerap kali muncul dalam relasi antar kelompok.⁷

fenomena kekerasan yang mengatasnamakan Agama dan etnis meningkat dan terasa cukup mengganggu kedamaian yang sudah sekian lama tercipta. Sebut saja, konflik poso, Ambon, bom-bom teroris, kekerasan etnis di Kalimantan, perusakan tempat Ibadah minoritas, dan yang terakhir kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dan HKBP adalah salah satu contoh dari sederetan kasus-kasus yang bertentangan dengan prinsip bhineka tunggal ika, (Indonesia yang majemuk).⁸

Sungguh amat sangat disayangkan ketika beberapa manusia di Indonesia beranggapan bahwasanya perbedaan tersebut adalah salah satu bentuk ketidakindahan, sehingga muncul sifat rasisme di dalam dirinya untuk menunjukkan eksistensi dan identitas pribadinya yang lebih baik daripada orang-orang lain disekitarnya. Di dalam wikipedia kamus besar bahasa Indonesia Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya

⁷ Anwar Hafid dkk, *Pendidikan Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal* (Jakarta: KEMENDIKBUD, 2015), 1-3.

⁸ Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 159.

atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

Dengan kata lain rasis adalah membeda-bedakan sesama makhluk hidup atau kepada sesama manusia. Membeda-bedakan antar suku, agama, golongan, ras, warna kulit dan lain-lain dengan anggapan bahwa rasnya lah yang paling baik, atau hanya suku dan budayanyalah yang dapat memperoleh hak di Indonesia, yang lainnya kurang berhak alias tidak boleh setara, oleh karena itu hal-hal semacam ini dirasa perlu adanya pendidikan multikultural, sebagai pedoman dan pemahaman bahwa seorang manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya selalu berinteraksi dengan orang yang berbeda dari dirinya, namun ia tetap sadar bahwasanya semua manusia di Indonesia sama-sama memiliki hak sebagaimana ia memperoleh hak.

Ibarat mandau bermata dua, di satu sisi bangsa Indonesia dikagumi keindahan keberagamannya. Para peneliti keilmuan sosial menemukan surganya di Indonesia, namun di sisi yang lain keberagaman juga sangat rentan untuk timbulnya konflik, terlebih jika masyarakat Indonesia tidak dapat mengelola keberagaman dengan bijaksana. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu kunci penting sebagai instrumen membangun peradaban manusia dan bangsa. Yaitu sebuah pendidikan yang merespon keberagaman sebagai sebuah keniscayaan.

Menurut Beny Susetyo di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, juga dalam pasal lain kaitannya dengan jaminan kebebasan dasar setiap manusia telah diregulasikan sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945. Begitupun dalam hal pendidikan sebagaimana diatur dalam UU sisdiknas tahun 2003 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 (1), bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, disebutkan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.⁹

Di dalam buku multikulturalisme tantangan global masa depan dan transformasi pendidikan nasional, H.A.R. Tilaar mengutip pendapat Hernandez yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status social, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.¹⁰ Di dalam literasi lain Zamroni juga mengutip pendapat Sleeter dan Grant, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan.¹¹

Kemajemukan (pluralitas), keanekaragaman (diversitas), dan kepelbahagian (heterogen) serta kebermacam-macam

⁹ Beny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta; LKiS, 2005), 171.

¹⁰ HAR Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 180.

¹¹ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 144.

(*multiformisme*) masyarakat dan kebudayaan di Indonesia merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan, sejak dulu sebelum terbentuk negara-bangsa. Ini harus kita akui secara jujur, terima dengan lapang dada, resapi dengan penuh kesadaran, kelola rawat dengan cermat, dan juga penuh dengan sukacita, bukan harus ditolak, pungkiri, abaikan, sesalkan, biarkan dan ingkari hanya karena kemajemukan dan keanekaragaman ternyata telah menimbulkan ekses negatif dan risiko kritis belakangan ini, antara lain benturan masyarakat dan kebudayaan lokal di pelbagai tempat di Indonesia.¹²

Berdasarkan yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan tentang nilai-nilai pendidikan multikultural yang di dalam Piagam Madinah untuk kemudian diambil kembali nilai-nilai tersebut dan diimplementasikan kedalam pendidikan Nasional. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan prespektif Piagam Madinah dalam Pendidikan Nasional”.

B. FOKUS PENELITIAN

Rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah dalam pendidikan Nasional?
2. bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah dalam pendidikan Nasional?

¹² Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 203.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan apa saja implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah pada pendidikan Nasional
2. Untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural perspektif Piagam Madinah pada pendidikan Nasional

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang tentunya nanti diharapkan juga akan merubah mindsite dan perilaku peneliti ke arah yang lebih baik. tentang apa dan bagaimana sebuah kajian nilai-nilai pendidikan multikultural dalam Piagam Madinah perspektif sirah nabawiyah ibnu Hisyam. Berharap bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan pada dunia pendidikan khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, tentunya berbagai manfaat dan pengalaman sererta memperoleh kepuasan intelektual. Lebih lanjut tentunya dapat mengambil ibrah yang sangat sarat akan makna sejarah dinamika

perkembangan Agama Islam yang di Pimpin oleh manusia Agung Rasul Muhammad SAW.

- b. Bagi Almamater IAIN Jember, peneliti amat sangat mengharapkan bisa bermanfaat se manfaat mungkin sebagai bahan referensi mengingat sangat terbatasnya referensi di perpustakaan IAIN Jember tentang Mulltikulturalisme. Juga suatu kehormatan bagi peneliti jika penelitian ini menjadi bahan kajian bersama.
- c. Bagi Masyarakat Luas, peneliti berharap bisa memberikan pemahaman masyarakat luas tentang toleransi, multikultural dalam pendidikan, diharapkan juga bisa memberikan efek super positif bagi khalayak ramai.

E. DEFINISI ISTILAH

Adapun istilah-istilah penting dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Nilai-nilai Pendidikan Multikultural

Kluckhon mendefinisikan nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat) yang sifatnya membedakan individu atau ciri kelompok dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antrara dan tujuan akhir tindakan. Sedangkan menurut Kupperman menjelaskan bahwa nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative¹³.

¹³ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), 9-10.

Adapun pendidikan Multikultural Anderson dan Crushe mendefinisikan pendidikan Multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian James Banks mendefinisikan Pendidikan Multikultural sebagai pendidikan *people of color*. Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (Anugerah tuhan/Sunnatullah), kemudian bagaimana mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.¹⁴

b. Pendidikan Nasional.

Definisi tentang pendidikan Nasional tertera pada Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bab 1 ketentuan umum pasal 2 yang berbunyi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.¹⁵

c. Piagam Madinah.

Piagam Madinah adalah perjanjian perdamaian antara kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar) dengan penduduk lokal Madinah yang beragama yahudi, kristen, dan penganut agama nenek moyang. Piagam Madinah berisi tentang toleransi hubungan antara muslim dengan sesama muslim maupun non muslim, persatuan, kesetaraan dan lain-lain.

¹⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 175-176.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 3.

Sedangkan menurut Ali Bulac sebagaimana dikutip Rahmad Asril Pohan menuturkan bahwa piagam Madinah merupakan suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang memberikan hak kepada kaum muslim untuk menguasai kota Arab dan pada saat yang sama melindungi hak kelompok lain. Dan menurut A. Sukardja Piagam Madinah merupakan dokumen politik bagi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada era Muhammad yang sarat dengan nilai-nilai transcendental. Piagam Madinah ini dibuat pada tahun VII M.¹⁶

Berdasarkan definisi istilah di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan sebuah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam memberikan pemahaman dan wawasan tentang keberagaman dan kemajemukan Agama, budaya, ras dan lain sebagainya, untuk dikemudian hari pemahaman tersebut dan membawa implikasi terhadap sikap toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa. Sedangkan pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Sedangkan Piagam Madinah peneliti menyimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah kontrak sosial yang berisi perjanjian

¹⁶ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 11-12.

antara kaum muslimin Madinah, kaum Yahudi, dan penduduk Paganisme Madinah yang berisi tentang aturan-aturan dalam kehidupan dan norma-norma sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliabel, dan obyektif.¹⁷

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka¹⁸. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan peneliti karena prosedur penelitian yang akan dihasilkan adalah berupa data-data berupa kata-kata dan gambar.

Adapun jenis penelitian yaitu *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.¹⁹

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kombinasi (mixed methods)* (Bandung: ALFABETA, 2014), 3.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 13.

¹⁹ M Iqbal Hasan, *pokok pokok materi metodologi penelitian* (Ghalia: Indonesia, 2002) 11.

Yang dimaksud dengan "pendekatan" disini adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁰ Penentuan pendekatan ini sangat menentukan objek penelitian yang akan diteliti, dan sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber dimana kita akan memperoleh data.

Mestika Zed mengemukakan bahwa hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka, perbedaan utamanya ialah terletak pada tujuan, fungsi, dan kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian tersebut. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. Sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan di atas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitiannya. Tegasnyariset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada hanya pada bahan-bahan dan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²¹

Mestika Zed menambahkan bahwa studi kepustakaan memiliki 4 ciri utama yaitu:

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002), 23.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

Pertama, ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda lainnya. Teks memiliki sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula.

Kedua, data pustaka bersifat siap pakai (*ready made*) yang berarti peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.

Ketiga, ialah bahwa data pustaka umumnya adalah sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orsinil dari tangan pertama dilapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung bias (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nigari disebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemukan data monografnya, tetapi ia tak selalu mendapa informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia dibuat berdasarkankepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hamper tidak memiliki control terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai tingkat tertentu terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau pelaku sejarah itu sendiri.

Keempat, adalah bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, peneliti berhadapan dengan informasi statistic, tetap. Artinya kapanpun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula, maka peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang system informasi dan teknik-teknik penelusuran data pustaka secukupnya.

2. Data dan sumber data

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar sebuah kajian. Sedangkan sumber data menurut Sukaddar Rumidi menyebutkan bahwa, Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif.²²

Secara umum data dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, data kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka, sedangkan data kuantitatif adalah nilai perubahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Pandangan umum mengatakan bahwa data kuantitatif merupakan kategori data yang lebih “baik” dan data kualitatif yang dinilai sering “tidak pasti”. Namun sebenarnya kedua kategori tersebut saling

²² Sukandar Rumini, *Metodologi Penelitian Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012), 44.

melengkapi, karena data kualitatif saja tidak akan memberikan informasi jika tidak didukung oleh data kuantitatif yang jelas, sebaliknya data kuantitatif sering kali tidak cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya jika tidak ditunjang oleh data kualitatif yang memadai.²³ bisa dikatakan bahwa sumber data merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian kali ini peneliti membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari oleh pengumpul data pada objek risetnya.²⁴ atau sebuah data yang didapat dari sumber pertama. Baik dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Dengan demikian data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian²⁵

Di dalam penelitian ini sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Sirah Nabawiyah Ibnu hisyam jilid pertama yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri dan sudah diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, Lc.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa data

²³ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2004), 67.

²⁴ Ibid., hal 69

²⁵ Rizal Nanda Maghfiroh, *Nilai Pendidikan Multicultural dalam Piagam Madinah dan Pancasila Serta Relevansinya Terhadap PAI* (UIN Maulana Malik Ibrahim), 78.

sekunder merupakan data yang didapatkan dari data sebelumnya yang sudah pernah disajikan oleh pihak lain. Misalnya terkait penelitian terdahulu, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti surat kabar, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.²⁶

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, mulai dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah, sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya. Untuk itu peneliti harus mengetahui darimana bahan dapat diperoleh yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data.

Di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar dan *artifact*, data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi.²⁸

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan semua data yang telah ditentukan baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder kemudian menganalisisnya dan menghimpun beberapa teori atau pendapat tokoh tentang Piagam Madinah dan pendidikan multikultural. Semua hal

²⁶ S Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 142.

²⁷ Ibid, hal 141.

²⁸ J,R, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 2010), 80.

tersebut dapat peneliti lakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi atau telaah dokumen. Teknik tersebut dipilih mengingat jenis penelitian ini adalah *library research*.

a. Teknik Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia atau *human resources* melalui observasi dan wawancara, disamping itu ada pula sumber yang bukan manusia atau *nonhuman resources*, antara lain dokumen, foto, dan bahan statistic dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi.²⁹

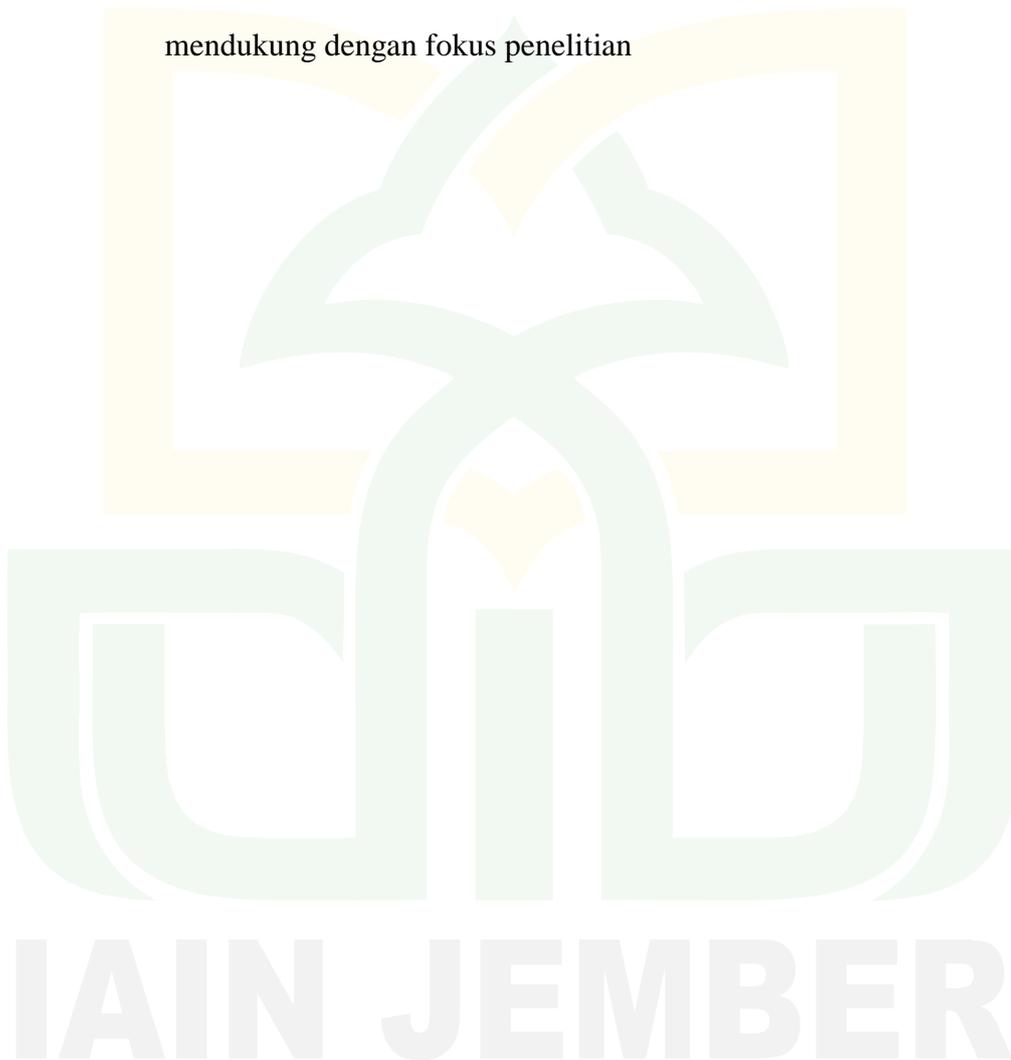
Secara definisi, dokumen berarti setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti record ialah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, berdasarkan beberapa pandangan para pakar penelitian kualitatif, dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.³⁰

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk

²⁹ M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Aimanshur, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2017), 191.

³⁰ Ibid., 190.

keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti informasi kelamiah yang sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.³¹ Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti melalui metode dokumentasi ini adalah foto gambar kegiatan yang mendukung dengan fokus penelitian



³¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 168.

4. Metode Analisis Data

setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisa data. Tahap analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

Semua jenis penelitian yang telah dikumpulkan barulah merupakan data mentah yang masih perlu diolah pada tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis (harfiah, uraian, pemilahan) ialah upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit analisis. Sebagai analisis cukup sederhana sifatnya dan sebageian yang lain agak rumit dan canggih (*sophisticated*). Sedangkan sintesis adalah upaya menggabung-gabungkan kembali hasil analisis kedalam struktur konstruksi yang dimengerti secara utuh, keseluruhan.³²

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah :

c. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.³³ Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 70.

³³ Wiranto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung, Tarsita, 1990), 139.

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.³⁴

d. Content analysis (analisis isi)

Untuk melakukan sebuah analisis pada sebuah teks yang padat isibiasanya digunakan sebuah teknik yang khas, teknik yang paling umum digunakan adalah teknik analisis isi (conten analiysis). Menurut Bareslon kajian isi adalah teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Definisi lain dikemukakan oleh Waber yang menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff, yaitu kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data konteksnya.³⁵

Guba dan Lincoln menguraikan prinsip dasar kajian isi dan ciri-ciri kajian isi yaitu ada lima,

Pertama, dan yang terpenting adalah proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan atau prosedur yang disusun secara eksplisit. Aturan itu harus berasal dari kriteria yang ditentukan dan prosedur yang ditetapkan. Analisis berikutnya yang akan

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

³⁵ Lexy J. Moloeng, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosadikarya, 2002), hal 6

mengadakan pengkajian harus menggunakan aturan yang sama, prosedur yang sama, dan kriteria yang sama sehingga dapat menarik kesimpulan yang juga sama.³⁶

Kedua, kajian isi adalah proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi . pada masa yang akan datang , penemuan hendaknya memerankan sesuatu yang relevan danteoritis. Atau dalam pengertian penelitian ilmiah, penemuan itu harus mendorong pengembangan pandangan yang berkaitan dengan konteks dan dilakukan atas dasar contoh selain dari contoh yang telah dilakukan atas dasar dokumen yang ada.

Keempat, kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan, jadi jika peneliti menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan. *Kelima*, kajian isi menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat juga dilakukan bersama analisis kualitatif.³⁷

5. Keabsahan data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Pada penelitian psutka, teknik keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Deduktif

³⁶ Ibid hal 220

³⁷ Indhra Mustofa, *Pendidikan Multikultural Perspaktif Gus Dur* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015), 29.

Metode deduktif merupakan teknik penulisan yang dimulai dari suatu wawasan teoritis yang selanjutnya dijabarkan menjadi suatu satuan-satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dikembangkan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka, peneliti menarik kesimpulan berupa satuan konsep tentang nilai pendidikan multicultural yang didapat dari alur perkembangan pendidikan multicultural.

2. Induktif

Teknik penulisan model induksi ini dipakai untuk mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang pakar yang menjadi pembahasan secara komprehensif, yang didukung oleh teori, konsep, dan data dokumentasi yang relevan.

Teknik induktif juga diartikan sebagai teknik penelitian yang berawal dari empiris dan mencari abstraksi.

3. Komparatif

Teknik komparatif adalah teknik penelitian yang berupaya membandingkan kategori-kategori untuk merumuskan sebuah teori atau konsep. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan teori atau konsep tersebut.

4. Interpretative

Interpretative dilakukan untuk menafsirkan data-data primer atau sekunder yang digunakan. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah

teori atau konsep yang dipakai. Dengan teknik ini seorang peneliti menyederhanakan dan memudahkan pembacanya untuk mengerti.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berarti deskripsi alur yang akan dibahas oleh peneliti, pembahasan tersebut dimulai dari bagian awal, bab I hingga bab penutup, format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi adapun sistematika secara terperinci adalah sebagai berikut.

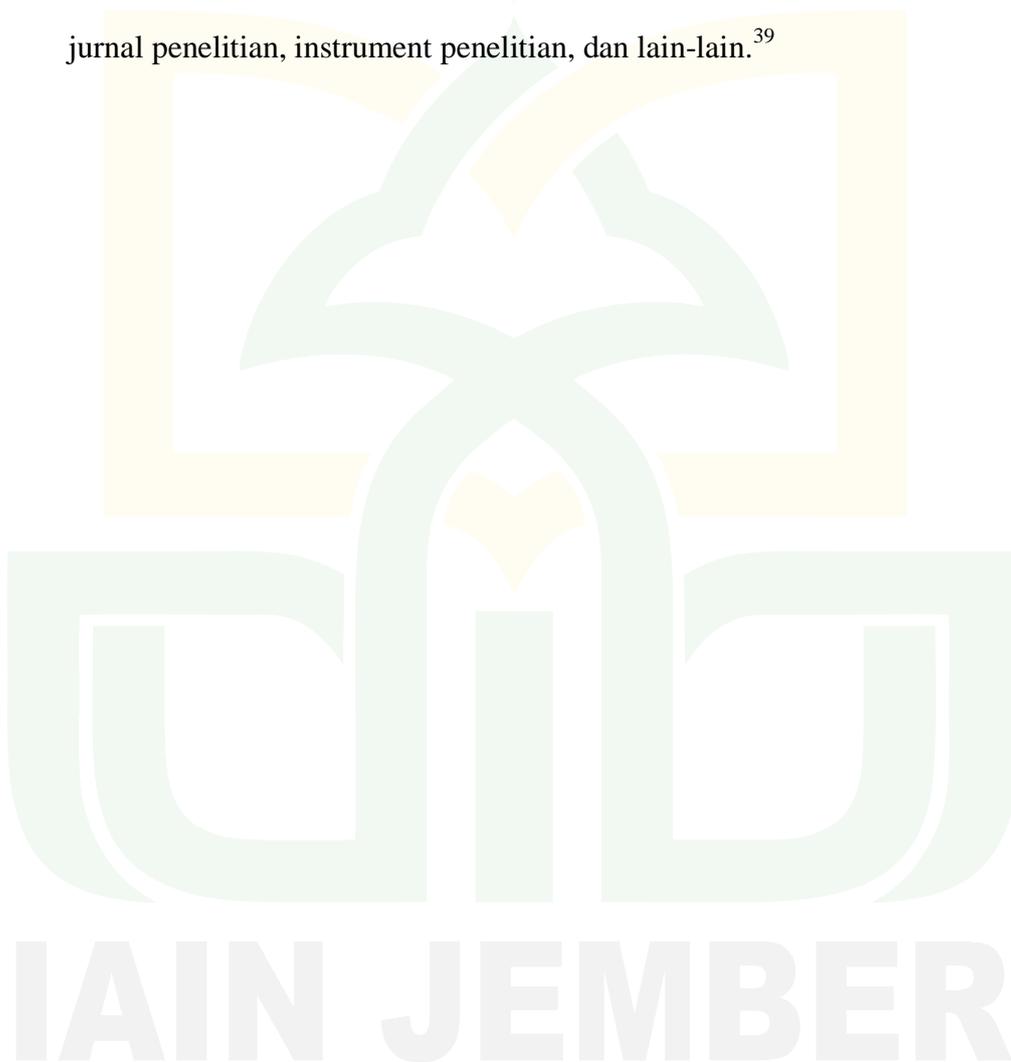
Bagian awal, berisi Judul penelitian (sampul), persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto peneliti, persembahan (jika ada), abstrak, daftar isi. Sedangkan Bab I meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, focus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi

Bab II berisi kajian kepustakaan penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa penelitian. Bab III dan bab selanjutnya masing-masing berisi gagasan pokok yang diteruskan dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan rangkuman pembahasan dan implikasi. Judul bab disesuaikan dengan materi yang dibahas. Bab inti dari skripsi ini disesuaikan dengan materi yang dibahas. Bab

³⁸ Rizal Nanda Maghfiroh, *Nilai Pendidikan Multicultural Pada Piagam Madinah Dan Pancasila Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2016), hal 86

inti dari skripsi diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab penutup atau bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan penelitian yang dilengkapi saran-saran untuk penulis dan yang terakhir adalah penutup berisi kesimpulan dan saran yang diperkuat dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran seperti foto, gambar, biodata penulis, surat keterangan, jurnal penelitian, instrument penelitian, dan lain-lain.³⁹



³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2018), 84.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Zuraidah Hafni (050704031), Fakultas Sastra program studi Bahasa Arab Medan yang berjudul “Piagam Madinah Dari Perspektif Kebudayaan” Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelusuri kembali tentang apa yang melatar belakangi terbentuknya sebuah perjanjian yang mendamaikan dan menentramkan penduduk Madinah, Piagam Madinah begitu mereka sebut.

Dikisahkan juga bahwa pada masa pra Islam Bangsa-bangsa Arab tidak mencatat sejarah mereka, melainkan mengikat semua nya dengan hafalan, namun ketika bangsa Arab sudah berpencar ke wilayah-wilayah tertentu ingatan mereka mulai melemah dan berinisiatif untuk mencatat sejarah mereka.

Setelah tradisi tulisan berkembang para sejarawan Muslim tidak hanya berperan sebagai informan yang memberikan informasi, namun juga melakukan pengkajian dan menugnpak fakta secara utuh, maka metode historiografi lebih mandiri dan berkembang. (Abdullah, 2004) tak heran rasanya jika Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia yang mengatur kebebasan beragama, kesetaraan hak dan lain sebagainya.

Namun penelitian yang ditulis oleh saudara Zuraidah Hafni membatasi kajiannya dalam bidang kebudayaannya saja, kebudayaan yang dimaksud disini adalah budaya masyarakat Madinah yang beragam bisa disatukan kembali setelah sekian lama peperangan antar suku berlangsung.

Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama mengkaji tentang Piagam Madinah, namun yang berbeda ialah focus kajiannya. Dimana saudara Zuraidah Hafni mengkaji kebudayaan sedangkan peneliti lebih focus terhadap nilai pendidikan Multikulturalnya di dalam Piagam Madinah. Adapun metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *Library research* (studi kepustakaan).

Kedua, Ibnu Adhi Prabowo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konsep Multikultural Piagam Madinah Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam”. Berangkat dari keterpurukan Muslim Indonesia sebagai mayoritas secara statistic namun minoritas secara toleransi. Peneliti saudara Ibnu Adhi Prabowo mengajak kembali menilik sejarah Rasulullah di dalam membangun masyarakat Madinah pada awal hijrah beliau. Di Madinah Rasulullah membuat kesepakatan bersama masyarakat Madinah yang waktu itu notabene bermacam-macam agama, mulai dari Yahudi, Kristen dan Paganism (Agama nenek Moyang).

Keberhasilan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah merupakan salah satu cermin tentang salah satu tujuan pendidikan Islam yaitu

membangun masyarakat dengan kondisi sosial yang baik dalam sisi toleransi dan kemanusiaan. Inilah yang kadang diabaikan oleh beberapa muslim Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama mengkaji tentang Piagam Madinah, bedanya terlihat dimana saudara Ibnu Adhi Prabowo membatasi kajiannya pada konsepnya saja, dimana bisa dimaknai konsep adalah Konsep adalah suatu gagasan atau ide yang dirancang terlebih dahulu sebelum suatu pekerjaan dimulai, konsep juga dapat diartikan sebagai gagasan awal dari sesuatu. Nah konsep tersebutlah yang oleh saudara Ibnu Adhi Prabowo ditarik kembali untuk kemudai menghasilkan sebuah tujuan pendidikan Islam. Sedangkan peneliti secara konseptual membahas apa-apa saja yang nilai atau kandungan Multikultural di dalam Piagam Madinah.

Ketiga, adalah skripsi karya Ali Irasyad, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Piagam Madinah Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Madinah”. Secara focus, skripsi ini membahas tentang latar belakang dibuatnya Piagam Madinah, kesenjangan sosial yang tinggi saat itu terjadi disebuah kota yang bernama Yatsrib, nama sebelum Madinah.

Keberagaman kota Yatsrib merupakan salah satu asset yang luar biasa untuk membentuk suatu keberagaman, komposisi masyarakat Yatsrib berdasarkan agama dan keyakinan terdiri dari 3 golongan, yakni umat muslim, Yahudi, dan kelompok paganisme (penganut agama nenek moyang).

Sedangkan secara suku terdapat banyak suku yang berkumin disana, dan suku Aus dan Khazraj lah terbilang dua suku besar.

namun penduduk Yatsrib kala itu tidak bisa mengelola keberagaman dengan baik. Tercatat terdapat 12 peperangan besar yang terjadi selama kurun waktu lebih kurang 120 tahun. Peperangan tersebut melibatkan semua lapisan suku dan masyarakat.

Ketiadaan suatu politik tunggal membuat keadaan menjadi *chaos*, hingga kemudian datanglah Rasulullah Muhammad yang hijrah dari Mekkah menuju ke Madinah. Program kerja yang dibuat Rasulullah waktu itu selain membangun Masjid juga membuat perjanjian dengan lapisan masyarakat secara umum. orang-orang Yahudi dan kelompok paganisme juga setuju dengan adanya perjanjian tersebut. Dikarenakan lelah selama bertahun-tahun hidup tanpa perdamaian.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang Piagam Madinah. Perbedaanya sangat jelas terlihat dalam focus kajian, dimana skripsi saudara Ali Irsyad membahas Piagam Madinah secara umum tentang latar belakang terbentuknya, kondisi politik, sosial, dan agama, serta hakikat dan fungsi Piagam Madinah. sedangkan peneliti hanya membatasi focus kajian terhadap nilai-nilai pendidikan Multikulturalnya saja.

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>1. Zuraidah Hafni Fakultas Sastra progam studi Bahasa Arab Medan yang berjudul “ Piagam Madinah Perspektif Kebudayaan”</p>	<p>a. mengkaji tentang Piagam Madinah b. menggunakan pendekatan kualitatif. c. menggunakan metode Library Research.</p>	<p>Fokus kajian, dimana Zuriah Hafni lebih memfokuskan kajiannya terhadap piagam Madinah ditinjau dari segi kebudayannya, sedangkan peneliti lebih berfokus terhadap nilai-nilai pendidikannya</p>
<p>2. Ibnu Adhi Prabowo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “konsep Multikultural Piagam Madinah dan relevansinya terhadap tujuan pendidikan islam”</p>	<p>a. mengkaji tentang Piagam Madinah b. menggunakan pendekatan kualitatif. c. menggunakan metode Library Research.</p>	<p>a. Fokus kajian penelitian Ibnu Adhi prabowo yaitu terhadap konsep dan relevansi, sedangkan peneliti lebih kepada implementasi. b. Tujuan penelitian Ibnu Adhi Prabowo yaitu relevansi terhadap pendidikan Islam, sedangkan peneliti terhadap pendidikan Nasional.</p>

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3. Ali Irsyad, NIM (01120708) Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Piagam Madinah dan pengaruhn ya terhadap masyarakat Madinah” .	a. mengkaji tentang Piagam Madinah b. menggunakan pendekatan kualitatif. c. menggunakan metode Library Research.	Fokus kajian skripsi Ali Irsyad sangat umum, yakni pengaruh Piagam Madinah terdapat masyarakat Madinah. Sedangkan peneliti membatasi fokus kajian terhadap nilai-nilai pendidikan multikulturalnya saja.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, maka posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti jelas terhadap focus kajiannya yaitu untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam Piagam Madinah kedalam Pendidikan Nasional. Mengingat penelitian dengan judul tersebut belum pernah dilakukan, adapun sebagaimana penelitian terdahulu yaitu juga mempunyai focus kajian masing-masing, seperti Ali irsyad mengkaji Piagam Madinah dan pengaruhnya, Ibnu Adi Prabowo juga membatasi kajiannya terhadap sebuah konsep multikultural dan relevansinya terhadap Pendidikan Islam, sedangkan peneliti lebih kepada implementasi Pendidikan Multikultural tersebut terhadap Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir Zuraidah Hafni yang berfokus terhadap Piagam Madinah yang dilihat dari perspektif kebudayaan Masyarakat Madinah.

B. Kajian Teori

1. Kajian teori tentang Nilai.

a. Pengertian dan ruang lingkup nilai

Definisi nilai sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, seperti yang dinyatakan Kurt Baier, seorang sosiolog menafsirkan nilai dari sudut pandangnya sendiri tentang keinginan, kebutuhan, sampai pada sanksi dan tekanan dari masyarakat, seorang psikolog menafsirkan nilai sebagai suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala psikologis seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan secara individual sampai pada wujud tingkah laku yang unik.⁴⁰

Nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative, Kupperman memaparkan definisi ini mengandung tekanan pada norma sebagai factor eksternal yang mempengaruhi sikap manusia, adapun menurut Gordon Allport mendefinisikan nilai sebagai keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Sebagai ahli psikologi kepribadian, bagi Allport nilai dapat terjadi pada wilayah psikologis yang disebut dengan keyakinan, sebagaimana ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya, seperti hasrat, motif, keinginan dan kebutuhan,

⁴⁰ Rohmat Mulyana, *Mengakulturasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), 7.

maka dari itu keputusan benar dan salah , indah tidak indah, baik dan buruk pada wilayah ini merupakan serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan pilihannya.

Kemudian Hans Jonas ia menyatakan bahwa nilai adalah alamat sebuah kata “ya”. (*value is address of yes*), atau kalau diterjemahkan secara kontekstual , nilai adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata “ya”, definisi ini merupakan definisi yang memiliki kerangka lebih umum dan luas daripada definisi sebelumnya, karena kata “ya” dapat mencakup nilai keyakinan secara psikologis maupun nilai patokan normative secara sosiologis, demikian pula kata “alamat” dalam definisi ini dapat mewakili arah tindakan yang ditentukan oleh keyakinan individu maupun norma sosial.

Definisi tentang nilai di atas adalah salah satu dari sekian banyak definisi nilai yang dapat dirujuk, para filsuf nilai yang berkerja pada *Union of international*, melaporkan tentang 15 definisi nilai yang berbeda, definisi ini akan bertambah jika kita merujuk pada sejumlah buku yang membahas secara khusus atau hanya menyinggung persoalan nilai sebagai makna yang abstrak, bukan sebagai harga barang atau benda, karena itu memilih definisi nilai bukan berarti menyalahkan definisi yang lain, hal itu tergantung dari sudut mana kita lihat dan keperluan apa yang kita

butuhkan. Karena itu butuh pengertian nilai yang lebih sederhana namun mencakup seluruh aspek yang terkandung dalam definisi di atas, kita dapat menarik definisi baru, yaitu : *Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan*”, definisi ini dapat mewakili dari semua definisi yang telah disebutkan di atas , walaupun ciri-ciri spesifik seperti norma, keyakinan, cara, tujuan, sifat, dan ciri-ciri nilai tidak diungkapkan secara eksplisit.⁴¹

2. Kajian Teori Tentang Pendidikan Multikultural Dan Pendidikan Nasional.

a. Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pada hakikatnya kehidupan mengandung unsur pendidikan karena adanya interaksi dengan lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta didik menyesuaikan diri dan menepatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan semua itu dan dengan siapapun.

Sedangkan pendidikan dalam arti luas dan terbatas adalah segala usaha sadar dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, non formal (masyarakat), dan informal (keluarga) dan dilaksanakan

⁴¹ Ibid., 8-9.

sepanjang hayat, dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan.⁴²

terlepas dari semua definisi tentang apa itu arti pendidikan, terdapat satu hal yang senada tentang misi utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia manusia beriman dan berilmu pengetahuan, yang keberadaannya antara satu dengan yang lainnya saling menunjang dalam melahirkan peradaban. Dimensi keimanan dan pengetahuan menjadi variabel utama dalam menjaga kepribadian pada diri manusia, keimanan akan selalu berorientasi pada ketaqwaan dan membawa dan membawa manusia pada kebenaran dalam menetapkan misi pengembangan ilmu pengetahuan.⁴³

Senada dengan tujuan pendidikan tersebut Al-Qur'an telah menjelaskan di dalam Surat at Taubah ayat 122

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

⁴² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam mulia, 2010) 17-18.

⁴³ Zubaedi, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2012), 1.

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau sedang berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah seringkali dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.⁴⁴

Sedangkan menurut para pakar atau tokoh pendidikan, pendidikan diartikan sebagai berikut.

1. Ki Hajar Dewantara.

Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai

⁴⁴ St. Rodliyah, *Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan* (Jember: STAIN Press, 2013), 25.

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

2. Ahmad D Marimba.

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang sama.

3. Menurut UU. RI. No. 20. Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

4. John Dewey.

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama Manusia.

Pendidikan adalah hasil peradaban suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu yang diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Bertolak dari pengertian ini, kemajuan pendidikan ditentukan oleh tingkat peradaban suatu bangsa. Sedangkan Menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Setiap manusia, menempuh kehidupan, baik fisik maupun rohani. Karena kehidupan adalah pertumbuhan, maka pendidikan merupakan proses yang membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan betumbuhnya budi pekerti (Kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan untuk memajukan kehidupan anak didik, agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan.⁴⁵

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan sebagai proses pembentukan berfungsi sebagai suatu kegiatan sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sedangkan pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu

⁴⁵Wasty Soemanto & Hendyat Soetopo, *Dasar Dan Teori Pendidikan Dunia* (Malang : Usaha Nasional, 1982), 11-12.

kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.⁴⁶

Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada rumusan J. Sudarminta yang memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu peserta didik, mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi yang dewasa-susila. Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empat pengertian yaitu: sebagai bentuk kegiatan, proses, buah, atau produk yang dihasilkan oleh proses tersebut, dan sebagai ilmu.⁴⁷ Sedangkan Multikultural adalah sebuah paham tentang keragaman etnis dan budaya dengan ajaran agama sebagai prinsip dan pedoman bagi interaksi interkultural. Yakni mengakui bahwa realitas Indonesia yang penuh warna harus diapresiasi dan dilestarikan dengan mengedepankan sikap-sikap toleransi dan menghargai.

Istilah multikultural dari aspek kebahasaan mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu “multi” yang bermakna plural (beragam, atau lebih dari satu), dan “kultural” yang berarti kultur atau budaya. Istilah multi mengandung arti yang berjenis-jenis, bukan sekedar pengakuan akan adanya yang berjenis-jenis,

⁴⁶ Anwar Hafid dkk, *pendidikan Multikultural berbasis kearifan local*, (Jakarta: KEMENDIKBUD,2015) hal 21.

⁴⁷ Darmaningtyas, *pendidikan dan setelah krisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal 3.

tetapi juga pengakuan tersebut mengandung implikasi-implikasi yang sangat luas dan kompleks karena berhubungan dengan ideologi politik dan ekonomi.

oleh karena itu multikultural berkaitan pula dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak hidup kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas karena mereka memiliki kebudayaan masing-masing. idealitas di atas pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya kelompok minoritas terintegrasi kedalam masyarakat mainstream.⁴⁸

Konsep multikultural juga diartikan sebagai konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai demokrasi. Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman, melahirkan suatu pola atau pemikiran baru yang dapat memperkokoh dan mempersatukan serta mengakui eksistensi keragaman budaya. Agar konsep Multikultural dapat berkembang dan disadari sebagai suatu perekat antara budaya

⁴⁸ Sulalah, *Pendidikan Multicultural, Dialektika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012), 42.

perlu dilatih dan didik pada generasi penerus melalui proses pendidikan pada satuan pendidikan.⁴⁹

Setiap identitas yang berbeda seperti etnis dan agama, dihormati dan diakui keberadaannya. Namun disaat yang sama mereka diikat oleh kesamaan sebagai warga negara dan umat manusia, dalam politik kita, Multikultural ini disebut dengan Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetapi bersatu. Jika asimilasi bisa diumpakan laksana jus, maka Multikultural laksana gado-gado. Aneka macam buah, jika sudah diblender menjadi jus, dia akan menyatu dan sulit dibedakan, baik bentuknya maupun rasanya, sedangkan dalam gado-gado, masing-masing unsurnya seperti tahu, tempe, toge, kangkung, saus kacang dan lontong , semua berdiri sendiri, tapi menyatu sebagai gado-gado. Perbedaan diakui sekaligus diikat oleh kepentingan bersama.⁵⁰

Haar Tilaar mengemukakan definisi pendidikan Multikultural sebagai sebuah pendidikan yang mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa.⁵¹

sedangkan menurut Zakiyuddin Baidhawi dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama berwawasan multikultural mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu cara

⁴⁹ Ibid, hal 21.

⁵⁰ Raihani, 2017, *Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), XV.

⁵¹ Haar Tilaar, *Multikultural. Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta, Grasindo, 2014), 276.

untuk mengajarkan keragaman, pendidikan multikultural menghendaki rasionalisasi etnis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter relatif, yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme, dan saling menghargai semua orang dan kebudayaan merupakan imperatif humanistik yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etis dan dunia manusia yang beragam, mengintegrasikan fakta-fakta, sejarah, kebudayaan, nilai-nilai struktur dan kontribusi semua kelompok kedalam sebuah kurikulum sehingga dapat membangun pengetahuan yang lebih kaya, kompleks, dan akurat tentang kondisi kemanusiaan di dalam melintasi konteks waktu, ruang dan kebudayaan tertentu.⁵²

Sedangkan menurut Raihani di dalam bukunya yang berjudul pendidikan Islam dalam masyarakat multikultural memaparkan bahwa pendidikan Multikultural, ialah suatu model pendidikan yang berusaha membangun peserta didik untuk bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan identitas budaya dalam masyarakat.⁵³

b. implementasi pendidikan multikultural

menurut para ahli sosiologi pendidikan terdapat relasi (timbang-balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial

⁵² Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Eirlangga, 2007), 8.

⁵³ Raihani, *Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), xiv.

masyarakat, relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban, dan sejenisnya tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu, majunya dunia pendidikan dapat dijadikan cermin majunya masyarakat, dan dunia pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakat yang juga penuh persoalan.

Di Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki kompleksitas masyarakat tertinggi di dunia memiliki persoalan-persoalan rumit seputar keragaman, perbedaan yang seharusnya dijadikan masyarakat Indonesia sebagai ciri dan identitas sebuah bangsa berbalik menjadi bumerang. Sederetan kasus persoalan seputar keragaman baik Agama, budaya, dan etnis kerap kali terjadi.

Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya yang sangat majemuk dan pluralis, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa, daerah, geografis, pakaian, makanan dan budayanya. Sedangkan dari sudut pandang vertikal, kemajemukan

bangsa dapat dilihat dari pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.⁵⁴

Pada satu sisi kemajemukan masyarakat memberikan *side effect* (dampak) secara positif, dan pada sisi yang lain menimbulkan sisi negatif, karena faktor kemajemukan inilah sering menimbulkan konflik antar kelompok yang pada akhirnya konflik antar kelompok tersebut melahirkan disabilitas keamanan, sosio-ekonomi dan tidak harmonisan sosial (*social disharmony*). Seorang pakar pendidikan Syafri Safirin, memetakan akar-akar konflik antar masyarakat yakni : (1) perebutan sumber daya dan alat-alat (*sources and to means of production*), (2) perluasan batas-batas sosial budaya (*social and culture borderline expansion*), (3) benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (*political, ideologi, and religius interest*).⁵⁵

Ibarat pedang bermata dua, disatu sisi bangsa Indonesia dikagumi keindahan keberagamannya. Para peneliti keilmuan sosial menemukan surganya di Indonesia, namun di sisi yang lain keberagaman juga sangat rentan untuk timbulnya konflik, terlebih jika masyarakat Indonesia tidak dapat mengelola keberagaman dengan bijaksana. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu kunci penting sebagai instrumen membangun peradaban manusia

⁵⁴ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184.

⁵⁵ *Ibid.*, 185.

dan bangsa. Yaitu sebuah pendidikan yang merespon keberagaman sebagai sebuah keniscayaan.

Di dalam buku multikultural tantangan global masa depan dan transformasi pendidikan nasional, Har Tilaar mengutip pendapat Hernandez yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-kecualian dalam proses pendidikan.⁵⁶ Di dalam literasi lain Zamroni juga mengutip pendapat Sleeter dan Grant, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan.⁵⁷

Wacana pendidikan multicultural ini dimaksudkan untuk merespons fenomena konflik etnis, sosial, budaya yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat yang berwajah multicultural.

Wajah multicultural di negeri ini hingga kini ibarat api dalam

⁵⁶ HAR Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 180.

⁵⁷ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 144.

sekam, yang suatu saat bisa muncul akibat suhu politik, agama, sosial, budaya yang memanas, yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali. Tentu penyebab konflik banyak sekali tetapi kebanyakan disebabkan oleh perbedaan politik, suku, agama, ras, etnis dan budaya. Beberapa kasus yang pernah terjadi di tanah air yang melibatkan kelompok masyarakat, mahasiswa, bahkan pelajar karena perbedaan pandangan sosial politik atau perbedaan SARA tersebut⁵⁸

penelitian tentang pendidikan multikultural sebenarnya terus berkembang , apalagi perhatian tentang pengembangan pendidikan multikultural semakin menemukan momentumnya ketika para sarjana baik dari barat maupun timur ataupun dari Indonesia sendiri terus mengkaji terkait pendidikan. Namun demikian dari penelitian yang dilakukan masih ada beberapa persoalan yang belum terungkap melihat persoalan yang terkait dengan pendidikan multikultural, misalnya belum diungkap mengenai model pendidikan berwawasan multikultural, fungsi struktural dalam sebuah lembaga pendidikan keagamaan, apalagi yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan bagaimana sebuah fungsi dikembangkan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan ini.

c. Ciri Pendidikan Multikultural.

⁵⁸ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 4.

Menurut Choirul Mahfud, pendidikan memiliki 4 ciri-cirinya, yaitu:

1. Tujuannya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan masyarakat berbudaya (berperadaban).
2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (kultur).
3. Metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan keragaman budaya bangsa dan kelompok etnis (Multikulturalis).
4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

Keempat poin yang dijabarkan oleh Choirul Mahfud tersebut sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dalam pasal empat dijelaskan bahwa:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- 
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat.
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadiln mutu layanan pendidikan.⁵⁹

d. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural.

⁵⁹ Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multicultural Sebagai Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 77.

Memaknai multikultural dalam konteks pendidikan memiliki implikasi bahwa, secara operasional pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang beragam bagi peserta didik (*multiple learning invironment*), penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan akademik peserta didik. Beberapa ahli pendidikan semisal Hilda Hernandez yang dikutip dari karyanya yang berjudul: “*Multikultural Education, A teacher Guide to linking context, proses, and content* “, menjelaskan bahwa Multicultural education adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan diri dengan cara merasa, menilai, dan berperilaku dalam sistem budaya yang berbeda dengan mereka. Kemudian Hilda menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan multikultural meliputi: konteks, proses, dan konten, pengembangan pendidikan multikultural, serta mengajar dalam perspektif multikultural.

Secara konseptual, pendidikan multikultural menurut Gorsky mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka.
- b. Siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis.

- c. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar.
- d. Mengakomodasikan semua gaya belajar.
- e. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda.
- f. Mengembangkan sifat positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda
- g. Menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat.
- h. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda.
- i. Untuk mengembangkan etnis, nasional, dan global.
- j. Mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu:

- a. Pemilihan mata pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa, keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda.

- b. Isi materi pelajaran yang dipilih harus berisi tentang perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok.
- c. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks dan waktu yang tepat. pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa kedalam kelas.
- d. Pendidikan multikultural hendaknya model belajar mengajar yang interaktif agar memudahkan siswa dalam memahaminya.⁶⁰

3. Piagam Madinah

1. Pengertian Piagam Madinah.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata piagam berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau pernyataan penangguhan mengenai suatu hal (ikrar). Kata piagam juga sama dengan kata Charter atau Pect dalam Bahasa Inggris yang berarti surat perjanjian. Dari pengertian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa piagam merupakan surat resmi atau dokumen perjanjian, penghargaan, dan sebagainya.

Sedangkan Madinah merupakan sebuah kota yang terletak di dalam propinsi Hijaz, kerajaan Saudi Arabia, kira-kira 270 mil sebelah utara kota Mekkah dan 650 mil sebelah tenggara Damaskus. Kota ini

⁶⁰ Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal Di Era Modern Dan Post Modernism* (Yogyakarta: IRCiSod, 2004), 306.

berada di ketinggian 2050 kaki di atas permukaan laut; dibagian barat terletak oase yang sangat luas dan subur, yang sebagian terbentuk dari letusan gunung berapi, sedangkan bagian timur dibatasi oleh medan lava, ketiga sisi lainnya dibatasi oleh perbukitan tandus yang berbentuk setengah lingkaran dengan puncak tertingginya adalah gunung hud, 1200 kaki lebih di atas oase. ⁶¹Dan Yatsrib adalah nama kuno dari Madinah al-Munawwarah, nama Yatsrib disebutkan di dalam tulisan Ma'ini sebagai symbol purbakalanya. wilayahnya merupakan daerah oasis penghasil kurma unggul dan gandum, mempunyai tanah subur dan air berlimpah serta dikelilingi dari setiap penjurunya oleh batu-batu volkanis hitam. Penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab tinggal di Thaif, mekkah dan Madinah. Sedangkan bangsa yahudi tinggal di Madinah dan sekitarnya. Kedua bangsa ini berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim as. Melalui dua putranya, Ishaq dan Ismail. Bangsa Arab melalui Ismail, dan bangsa Yahudi melalui Ishaq.⁶²

Jika kata piagam disatukan dengan kata Madinah maka lahirlah kata Piagam Madinah, atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *As-Shahifal Madinah*. Piagam Madinah berarti perjanjian yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah antara kaum Muhajirin, Anshar, kaum Yahudi dan penduduk local Madinah lainnya.

⁶¹ Majid Ali Khan, *Muhammad SAW Rasul Terakhir* (Bandung : PUSTAKA, 1980), 87.

⁶² Cholis Nafis, *Piagam Madinah dan deklarasi HAM*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), cet ke 2, hal 21-22.

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal dalam Dahlan (2001:1) Piagam Madinah semula dalam teks aslinya tidak terdapat pasal-pasal, pemberian pasal-pasal sebanyak 47 baru kemudian dilakukan oleh A.J Winsick dalam karyanya *Mohammed et de joden te Medina*, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra semit. Dalam Sukardja (2002:45) disebutkan bahwa kalimat-kalimat *Shahifah* (piagam), seperti dalam sirah Nabawiyah Ibn Hisyam tersusun secara bersambung, tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair.

2. Latar Belakang Piagam Madinah

Berbicara tentang asal muasal dari Piagam Madinah tentu tidak lepas dari sebuah peristiwa Hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah. Makkah kota kakek, keluarga dan tempat Kelahiran nabi berada di dalam kekuasaan orang-orang Quraisy, dan Nabi selama tiga belas tahun perjuangannya di balik dinding-dinding yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy, oleh karena itu salah satu upaya untuk membuka jendela dunia luar dan menyingsingkan lengan baju ialah Hijrah, dalam rangka menyelamatkan kebebasan dan keimanan serta menunaikan risalah Ilahiah yang universal dan penting itu. Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan kota Makkah dengan sembunyi-sembunyi, atau dengan cara sendiri-sendiri, sementara itu orang-orang Quraisy melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi para pengikut Nabi Muhammad SAW keluar kota, sebagian dari mereka

ditangkap dan dipenjarakan dan isteri-isteri sebagian yang lainnya ditahan untuk menghalangi suami-suami mereka keluar dari kota Makkah.⁶³

Sementara itu komposisi masyarakat Madinah terdiri dari suku bangsa utama yang tinggal di kota tersebut ialah suku Aus dan Khazraj. Disamping itu ada pula pemukiman-pemukiman orang yahudi yang tinggal di pinggir kota, meski sejarah masuknya orang yahudi gelombang pertama belum diketahui, namun gelombang perpindahan mereka yang utama terjadi akibat pengusiran kaisar Hardian (kekaisaran Romawi) tahun 135 Masehi, kala itu suku bangsa Arab yakni Aus dan Khazraj menguasai daerah oase, setelah datangnya pemukiman Yahudi suku Aus dan Khazraj ditindas kegiatan perekonomian mereka dan mendirikan benteng-benteng di sekitar kota. Koloni-koloni Yahudi yang kuat dipegang oleh Bani Quraizhah, Bani Qainuqa' dan Bani Nadhi, oleh karena besarnya pengaruh orang-orang Yahudi ini, maka para penyembah berhala Yatsrib berlaku moderat. Dari kitab suci Yahudi pulalah mereka mengetahui akan Nabi yang dijanjikan. Sehingga dikalangan bangsa Arab banyak juga yang menganut yudaisme dan bergaul bersama orang-orang Yahudi.

Menurut Sejarawan terkenal, Ya'qubi, Bani Quraizhah dan Bani Nadhir adalah orang-orang Arab yang yang kemudian menjadi pengikut Yahudi. Sedangkan menurut sejarawan lain Al-Mas'ud di dalam karyanya yang berjudul *kitab al-asraf wa-Tanbih* (buku tentang kemewahan dan peringatan) beliau menceritakan bahwa orang-orang Yahudi Hijaz berasal

⁶³ Ali Syari'ati, *Rasulullah SAW sejak Hijrah hingga wafat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hal 22

dari Jidzam. Karena merasa jijik dengan penyembah *amalqah* atau penyembah berhala, mereka mengimani dan menerima ajaran Nabi Musa, kemudian mereka hijrah ke Hijaz dan Syiria yang terdiri dari tiga suku yakni Bani Quraizhah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa' tinggal di Madinah, ditempat ini merka membangun kubu-kubu dan benteng pertahanan.⁶⁴

Adapun penduduk Madinah menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang terbagi atas beberapa suku. Suku-suku terkemuka dan kuat dari golongan Arab adalah suku Aus dan Khazraj yang bermigrasi dari Arab selatan, disamping suku-suku Arab lain yang lebih dahulu menetap di kota itu. Adapun dua golongan Yahudi yang mempunyai lebih dari dua puluh suku yang menetap di Madinah. Suku-suku terkemuka seperti yang disebutkan sebelumnya ialah (Bani Qinuqa', Bani Quraidzah, dan Bani Nadhir) ialah Banu Tsa'labah dan Banu Hadh.

Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, di dalamnya dihuni oleh masyarakat yang kompleks, baik kompleks secara budaya, kepercayaan, maupun ras yang berbeda-beda. Terlebih kemajemukan masyarakat Madinah bertambah setelah beberapa penduduk Mekkah bermigrasi ke Madinah. Menurut Hasan Ibarahim hasan penduduk Madinah terbagi menjadi tiga golongan besar, *pertama*, kaum Muhajirin, yakni mereka yang bermigran atau hirah dari Mekkah ke Madinah untuk

⁶⁴ Majid Ali Khan, *Muhammad SAW Rasul Terakhir* (Bandung : PUSTAKA, 1980), 88.

menyelamatkan Agamanya. *Kedua*, kaum Ansor, mereka adalah penduduk asli Madinah yang kemudian secara sukarela masuk agama Islam. Mereka terdiri dari kaum Aus dan Khazraj, *ketiga*, kaum Yahudi, mereka adalah suku Yahudi yang kemudian secara berangsur keluar dari jazirah Arab.

Sedangkan menurut Muhammad Zafrullah Khan menjabarkan empat golongan dengan rumusan yang berbeda. *Pertama*, kaum Muhajirin dan Anshor, *kedua*, golongan Aus dan khazraj yang keislamannya masih ditingkat nominal, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Nabi Muhammad SAW, *ketiga*, golongan paganism, meski dalam waktu yang singkat telah menjadi Muslim. Dan keempat, adalah golongan Tahudi yang terdiri dari tiga suku utama, yakni Bani Qinuqa', Bani Quraidzah, dan Bani Nadhir.⁶⁵

Untuk itu masyarakat Madinah merupakan komunitas heterogen yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan dan agama. Perselisihan dan perang saudara serta perang antara suku mennjadi pemandangan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya , saat itu kota Madinah dilanda kekacauan sosial politik. Dalam konteks demikianlah, Piagam Madinah dibuat dan lahir dari tangan utusan Allah, Muhammad.

Piagam ini menjadi naskah bersama suku-suku yang ada dalam kota Madinah yang memuat berbagai perjanjian untuk hidup bersama, berdampingan, saling menghormati, dan juga saling menjaga. Dalam naskah tersebut realitas sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad

⁶⁵ Cholis Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), 21-22.

berhasil secara gemilang menyatukan berbagai perbedaan ditengah masyarakat Madinah. Asghar Ali memandang piagam tersebut sebagai revolusioner dan sangat mendukung gagasan Nabi Muhammad bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan damai.⁶⁶

Dengan adanya piagam tersebut, secara bertahap Nabi Muhammad dapat mengorganisasikan penduduk Madinah yang heterogen tersebut menjadi suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Masyarakat yang di dalamnya terdapat suatu system hubungan tertib sosial yang mencakup semua kelompok untuk hidup bersama dan bekerja sama dalam suatu wilayah tertentu. Sebelum itu masyarakat Arab tidak pernah hidup sebagai suatu komunitas antarsuku dengan satu kesepakatan. Untuk membentuk suatu kesepakatan demikian semestinya ada hukum dan undang-undang , aturan, atau moral dan agama, serta kekuasaan yang mengikat para anggotanya.⁶⁷

IAIN JEMBER

⁶⁶ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 83.

⁶⁷Ibid., 84.

BAB III

A. Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Piagam Madinah.

1. kota Madinah

Arabia atau Jazirah Arab terletak dibarat daya benua Asia. Luasnya 2,590.000 km². Jazirah adalah daerah gurun pasir yang tandus dan sangat luas: 650 mil lebar dan 1300 mil panjangnya. Dalam gambaran peta Jazirah Arab berbentuk persegi panjang, yang sisi-sisinya tidak sejajar. Semenanjung ini dikelilingi oleh air di tiga sisi dan padang pasir di satu sisi. Disebelah barat berbatasan dengan laut merah, disebelah selatan berbatasan dengan laut Hindia, disebelah timur dengan teluk persi dan teluk Oman dan disebelah utara dengan gurun Irak dan gurun Syam (Gurun Syiria), panjangnya 1000 km lebih, dan lebarnya kira-kira 1000 km. Jazirah Arab dilihat dari bagian tanahnya terbagi atas dua bagian, yakni bagian tengah dan tepi.⁶⁸

Sedangkan jika dilihat dari wilayahnya terbagi menjadi lima bagian, yaitu: Hijaz, Tihamah, Najd, Arud dan Yaman. Masing-masing wilayah tersebut terdiri atas beberapa bagian. Hijaz lah yang paling luas diantara wilayah yang lainnya, daerah tersebut merupakan daratan yang memanjang dari utara ke selatan, terletak di antara dataran tinggi Najd dan daerah pantai Tihamah, sejajar dengan laut merah. Panjangnya 1500 km dan lebarnya 300 km, di wilayah Hijaz terdapat tiga kota utama, yakni Thaif, dan dua kota bersaudara yang terukir dan populer dalam

⁶⁸Cholis Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM Studi Historis Dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralism Beragama* (Jakarta Selatan: Jagaksara, 2015), 20.

sejarah islam, yaitu Mekkah tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diturunkannya wahyu yang pertama, sedangkan kota Madinah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat baru dan membuat sebuah konstitusi Islam pertama.⁶⁹

dalam lisan al-Arab, leksikal Madinah diartikan sebagai benteng yang dibangun atas tanah yang keras. Selanjutnya Ibn Manzur menyebutkan bahwa leksikal Madinah lebih dikenal dengan nama kota Muhammad. Sedangkan menurut Musdah, Madinah secara etimologis berarti tempat peradaban. Kata ini dipadankan dengan kata Yunan polis yang dari kata itu terbentuk kata politik. Kata Madinah mengandung isyarat akan cita-cita kehidupan yang teratur dan berkesopanan. Karena itu, dalam Bahasa Arab, peradaban atau kehidupan yang teratur dinamakan dengan istilah *tamaddun*, atau *madaniyah*. Kondisi masyarakat di Yastrib samasekali berbeda dengan Mekkah. Kota ini bukanlah kota pedagang, tetapi kota petani. Masyarakatnya tidak homogen, tetapi terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi.⁷⁰

Sebelum dinamakan Madinah, kota ini dikenal dengan nama Yastrib, sebuah kota yang terletak di dalam provinsi hijaz Kerajaan Saudi Arabia , 270 mil sebelah utara kota Mekkah dan 650 mil sebelah tenggara kota damaskus, kota ini berada pada ketinggian 2050 kaki di atas permukaan laut, dibagian barat terdapat oase yang luas dan subur yang

⁶⁹ Ibid., 21.

⁷⁰ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA 2014), 10-11.

sebagian terbentuk dari letusan gunung berapi. Sedangkan bagian timur dibatasi oleh medan lava , ketiga sisi lainnya dibatasi oleh perbukitan tandus yang berbentuk setengah lingkaran , dan puncak tertinggi ialah gunung uhud 1200 kaki lebih di atas oase.⁷¹

Secara geografis, kota ini datar yang dikelilingi gunung dan bukit serta beriklim gurun. Suhu tertinggi berkisar antara 30°C sampai 45°C pada waktu musim panas, dan suhu rata-rata berkisar antara 10°C sampai 25°C . berikut rinciannya:

Negara : Arab Saudi

Kordinat: 24*28*N39*36'E/24.467*N39.600'E

Provinsi : Madinah

Wali kota : Khalid Taher

Gubernur regional : Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud

Luas

Kota : 590 km² (227 sq mi)

Kota : 290 km² 113 sq mi)

Ketinggian :608 m (1.995 ft)

Penduduk

⁷¹ Ali Syari'ati, *Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 22.

Kota : 1. 183. 205

Kepadatan : 2000/ km² (5,200/sq mi)

Zona waktu : waktu standar Arabia

Madinah berada di sebuah kota yang subur. Di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan bukit Ayir: disebelah utara bukit Uhud dan ur: serta disebelah timur dan barat dengan gurun pasir atau Harrah. Bila turun hujan, lembah tersebut menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan Harrah sebelah timur. Di samping terletak di jalan yang menghubungkan antara Yaman dan Syiria, kota itu memiliki sejumlah oase yang yang dipergunakan untuk penanaman kurma, biji-bijian dan sayur untuk dimakan. Karena itu mayoritas penduduknya bercocok tanam di samping berdagang dan beternak.⁷²

2. Kondisi Sosial Politik Masyarakat Madinah Sebelum Rasulullah Hijrah.

Yatsrib adalah nama kuno dari Madinah Al-Munawwarah, nama Yatsrib disebutkan dalam tulisan Ma'ani sebagai symbol kepurbakalaannya. Penduduknya terdiri dari bangsa Arab tinggal di Thaif, Mekkah dan Madinah sedangkan bangsa Yahudi tinggal di Madinah dan sekitarnya. Kedua bangsa ini berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim as. Melalui kedua putranya yakni ishaq dan Ismail. Bangsa Arab melalui Ismail sedangkan bangsa

⁷² Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 31-32.

Yahudi melalui Ishaq. Bangsa Arab yang berasal dari satu rumpun yaitu ras Semit yang kemudian menyebar keseluruh penjuru Jazirah Arab telah melahirkan kebudayaan dan kepercayaan dalam hidupnya sesuai dengan pengalaman hidup yang membuat mereka mempercayai suatu benda, alam atau mahluk halus. Namun sedikit diantara mereka (bangsa Semit) yang percaya kepada agama nenek moyang mereka, ialah agama *Hanafiyyah* yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as.⁷³

Maka dari itu jika dilihat dari aspek agama dan keyakinan, sebagaimana orang-orang Mekkah, penduduk Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah ﷺ badalah penyembah berhala. *Manah* adalah berhala yang mereka yakini mempengaruhi nasib manusia. Berhala ini merupakan dewa-dewa terpenting yang disembah suku-suku Azad, Aus, dan Khazraj. Sedangkan bangsa yahudi adalah penganut Agama Yahudi. Sebagai ahli kitab penganjur monoteisme, mereka mencela tetangga-tetangga kaum Arab yang pagan dan menyembah berhala sebagai metode pendekatan kepada tuhan. Mereka juga memperingatkan kaum Arab bahwa kelak akan lahir seorang Nabi yang menghabiskan mereka dan mendukung orang Yahudi. Selain mencaci orang-orang Yhudi juga menginformasikan ajaran taurat kepada orang Arab tentang adanya hari kebangkitan, balasan dan

⁷³ Cholis Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM Studi Historis Dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralism Beragama* (Jakarta Selatan: Jagaksara, 2015), 21-22.

hukuman atas perbuatan manusia dan bahwa nabi terakhir yang akan lahir adalah pendukung agama monoteisme.⁷⁴

Suku Aus dan Khazraj sebagai dua suku terbesar di Madinah adalah penganut agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala dan mempercayai roh-roh dan benda yang dapat mendatangkan kebaikan atau nasib sial.⁷⁵

Sementara jika dilihat dari segi kultur, masyarakat Madinah dibagi atas dua bagian besar, yaitu masyarakat Badui (nomadic Bedouins), dan masyarakat kota (settled folk). Orang-orang badui adalah mereka yang tinggal di gurun sahara, sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Mesir bernama Simneh bahwa orang-orang Badui gemar berperang, hidup berpindah-pindah (nomaden), senang hidup bebas. Sampai abad kelima Masehi tradisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mereka merupakan penduduk terbesar di Arabia. Di Hijaz misalnya, lima per enam dari penghuninya adalah nomadic, tempat tinggal mereka berupa tenda-tenda. basis ekonomi mereka adalah mengembangbiakkan ternak disamping mereka berburu. Sedangkan masyarakat kota (settled folk) adalah orang-orang Arab yang hidup di kota-kota seperti Makkah, Madinah dan di Yaman. Mereka berbasis ekonomi dengan pertanian, perdagangan dan perindustrian.

⁷⁴ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 35.

⁷⁵ Cholis Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM Studi Historis Dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralism Beragama*, (Jakarta Selatan: Jagaksara, 2015), 32.

Pada dasarnya mereka hidup menetap, kecuali kalau terdesak dengan keadaan seperti diusir oleh kelompok lain yang memerangi mereka dan mereka tidak mampu untuk bertahan⁷⁶

Adapun komposisi masyarakat Madinah sebelum Rasulullah Hijrah terdiri dari suku bangsa utama yang tinggal di kota tersebut ialah suku Aus dan Khazraj. Disamping itu ada pula pemukiman-pemukiman orang yahudi yang tinggal di pinggir kota, meski sejarah masuknya orang yahudi gelombang pertama belum diketahui, namun gelombang perpindahan mereka yang utama terjadi akibat pengusiran kaisar Hardian (kekaisaran Romawi) tahun 135 Masehi, kala itu suku bangsa Arab yakni Aus dan Khazraj menguasai daerah oase, setelah datangnya pemukiman Yahudi suku Aus dan Khazraj ditindas kegiatan perekonomian mereka dan mendirikan benteng-benteng di sekitar kota.

Koloni-koloni Yahudi yang kuat dipegang oleh Bani Quraizhah, Bani Qainuqa' dan Bani Nadhi, oleh karena besarnya pengaruh orang-orang Yahudi ini, maka para penyembah berhala Yatsrib berlaku moderat. Dari kitab suci Yahudi pulalah mereka mengetahui akan Nabi yang dijanjikan. Sehingga dikalangan bangsa Arab banyak juga yang menganut yudaisme dan bergaul bersama orang-orang Yahudi. Menurut Sejarawan terkenal, Ya'qubi, Bani Quraizhah dan Bani Nadhir adalah orang-orang Arab yang yang kemudian menjadi pengikut Yahudi.

⁷⁶ Ibid., 33-34.

Sedangkan menurut sejarawan lain Al-Mas'ud di dalam karyanya yang berjudul *kitab al-asraf wa-Tanbih* (buku tentang kemewahan dan peringatan) beliau menceritakan bahwa orang-orang Yahudi Hijaz berasal dari Jidzam. Karena merasa jijik dengan penyembah *amalqah* atau penyembah berhala, mereka mengimani dan menerima ajaran Nabi Musa, kemudian mereka hijrah ke Hijaz dan Syiria yang terdiri dari tiga suku yakni Bani Quraizhah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa' tinggal di Madinah, ditempat ini merka membangun kubu-kubu dan benteng pertahanan.⁷⁷

Sejarah menyebutkan bahwa sebelum pasca lahirnya Islam di wilayah Hijaz tidak memiliki pemerintahan dan persatuan politik di bawah satuan pemerinahan. Hijaz memang satu-satunya daerah di Jazirah Arab yang menikmati kemerdekaan sejak lama tanpa dipengaruhi oleh pergolakan politik yang diperankan oleh sejumlah kerajaan Arab: Arabia utara dan selatan maupun kerajaan Romawi dan Persia. Perbedaannya , jika Mekkah di perintah oleh aristocrat Quraisy, maka Madinah tidak terdapat persatuan dan kesatuan penduduk di bawah satu pemerintahan. Situasi yang tidak baik ini berasal dari konflik yang terus menerus antara dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj yang sama-sama berasal dari Arabia Selatan. Situasi semakin menjadi runyam dan rumit dengan hadirnya suku-suku Yahudi yang ikut serta dalam konflik tersebut.

⁷⁷ Majid Ali Khan, *Muhammad SAW Rasul Terakhir* (Bandung : PUSTAKA, 1980), 88.

Kehidupan di kota Madinah cenderung lebih tidak teratur, karena penduduknya yang heterogen itu tidak berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan di bawah pemerintahan dan membawahi semua kabilah yang ada hanya pemimpin-pemimpin suku yang selalu dan hanya memikirkan kelompoknya masing-masing. Mereka bersaing atau berperang untuk menanamkan pengaruh pada masyarakat Madinah. Sehingga resiko untuk timbul konflik perpecahan antar suku sangat mungkin untuk terjadi.

Demikianlah yang terjadi di Madinah, yaitu konflik antar dua suku Arab, Aus dan Khazraj disatu pihak, dan konflik dengan suku-suku Yahudi di lain sisi. Mereka bersaing berebut pengaruh atas masyarakat Madinah dengan harapan akan menjadi penguasa di kota tersebut. Sehingga tercatat ada dua belas kali peperangan yang terjadi antara Aus dan Khazra. Demikianlah yang terjadi di Madinah, yaitu konflik antar dua suku besar, Aus dan Khazraj di satu pihak dan konflik diantara kedua kelompok tersebut dengan suku-suku Yahudi di lain pihak, mereka berebut bersaing merebut pengaruh atas masyarakat Madinah untuk menjadi penguasa kota itu, sehingga tercatat ada dua belas kali peperangan yang terjadi Aus dan Khazraj, kedua belas peperangan tersebut ialah perang Samir, Surrah, al-Husain ibn al-Hallat, Rabi; al-zufri Fari , Hatib, Rabi; Baqi, Fijar, Ma'bas wa midras, Fijar II, dan terakhir ialah perang Bu'ats (lihat Mustafa Kamal Wasfi, Muhammad wa Banu Israil, (Kairo: Lajnah al-Khuraba', 1976), hal 23).

1. Hijrahnya Rasulullah Ke Madinah.

Salah satu aspek terpenting di dalam revolusi ini adalah transformasi moral dan spiritual adalah tingkah laku dan kepribadiannya. Serta transformasi yang ditegakkannya sejalan dengan isi dan risalah itu sendiri. Karena pembaruan akhlak pribadi merupakan dasar bagi pembaharuan masyarakat, maka tak pelak lagi jika transformasi ini menjadi ajaran pokok guna adanya perbaikan sosial. Oleh karena itu tidak berlebihan rasanya jika Allah menggambarkan diri Nabi Muhammad yang tampak dalam firmanNya⁷⁸

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Dan Nabi Muhammad sendiri bersabda “saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”, serta “Tuhan menyuruhku untuk berlaku jujur, maka aku akan benar-benar melakukannya”. Keteladanan berpengaruh besar dalam transformasi moral dan spiritual yang berlangsung semasa beliau hidup maupun setelah wafatnya. Keimanan yang telah ditanamkan serta ajaran yang beliau sebarkan melahirkan pengaruh yang bersamaan. Prinsip-prinsip persamaan, persaudaran, keadilan dan kemerdekaan yang dirumuskan sebagai bagian utuh dengan iman, telah membentuk akhlak yang luhur dan melahirkan jiwa yang mulia di dalam masyarakat.⁷⁹

Kira-kira itulah yang dipandang oleh penduduk Madinah tentang Nabi Muhammad, terdapat mimpi-mimpi penduduk Madinah akan

⁷⁸ W Montgomery Watt, *Muhammad Nabi Dan Negarawan*, (Jakarta: Cv Kuning Mas, 1984), 62.

⁷⁹ *Ibid.*, 63.

perdamaian, persaudaraan, dan kemerdekaan, maka siapa lagi yang bisa melakukan itu semua di Madinah, kota yang penuh dengan kekacauan karena perang antar suku dan saudara, maka Nabi Muhammadlah jawabannya. Seorang Nabi yang diramalkan kaum Yahudi akan membawa ajaran monoteisme dan menjadi oase penyejuk Madinah dengan semua risalah yang beliau bawa.

Maka ketika terdengar kabar bahwa beliau akan hijrah ke Madinah, penduduk kota tersebut gembira bukan kepalang, apa yang mereka mimpikan selama ini dating dan akan segera terwujud penduduk. Yatsrib yang dulu penuh dengan peperangan dan pertumpahan darah, menjadi masyarakat Madinah yang madani, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan persaudaraan, selamat tinggal rasisme.

Berbicara tentang Hijrah, maka ada beberapa definisi yang dipakai di dalam pemaknaan kata Hijrah, salah satunya yakni pemutusan keterikatan terhadap tanahnya, bisa mengubah pandangan manusia terhadap alam dan mengubahnya menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh, yang pada akhirnya hilanglah kejumudan, kemerosotan sosial, pemikiran dan perasaan, sehingga masyarakat yang *rigid* dan jumud itu bisa berubah menjadi masyarakat yang dinamis. Dengan kata lain hijrah itu sendiri merupakan pada dasarnya adalah gerakan dan loncatan besar manusia. Ia meniupkan semangat perubahan dalam pandangan masyarakat, dan pada gilirannya menggerakkan dan

memindahkan mereka dari lingkungan yang beku menuju tangga kemajuan dan kesempurnaan.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 di jelaskan bahwa

“sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Uraian tentang dakwah Nabi Muhammad sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, tampak sekali bahwa kaum Arab Mekkah lebih sulit menerima Islam daripada kaum Madinah. Ppenduduk Mekkah sulit menerima Islam karena mereka melihat bahwa Islam bukan hanya mengancam keyakinan mereka yang polietis, tetapi juga merupakan ancaman yang serius terhadap struktur sosial dan kepentingan perdagangan mereka, masalahnya, islam disamping pembawa ajaran monoteisme juga sangat menekankan keadilan sosial.⁸⁰

Pandangan tersebut ditopang oleh corak masyarakat Mekkah yang homogen sehingga lebih mudah dikontrol oleh kaum arsiktorat Quraisy sebagai penguasa kota Mekkah. Sedangkan Madinah yang didiami oleh golongan suku, agama, dan keyakinan tidak memiliki pemerintahan untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen itu. Golongan-golongan yang ada selalu bersaing untuk menjadi penguasa di kota tersebut. Olrh karena itu, dari segi sosio politik, mereka menghendaki munculnya seorang

⁸⁰ Suyuthi Pulungan , *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994) 53.

pemimpin yang dapat mempersatukan mereka, maka, begitu mereka mengetahui bahwa Nabi yang disebut-sebut kaum Yahudi telah muncul, mereka menerimanya secara terbuka dan mengakui Muhammad sebagai pemimpin mereka dan sekaligus mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah.⁸¹

Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari senin, 27 september tahun 622 M. berbagai kabar menyatakan bahwa penduduk Madinah sudah tidak sabar menunggu kedatangan beliau disana. Maka, beliau tinggal di Quba' selama tiga hari penuh. Selama itu juga, beliau mendirikan sebuah masjid yang dibangun pertama kali dalam Islam. Pada jum'at pagi beliau meninggalkan Quba', pada siang harinya, beliau dan para sahabatnya berhenti di lembah Rantina untuk shalat bersama bani Salim yang berasal dari suku Khazraj yang telah menunggunya. Ini adalah shalat jum'at pertama yang beliau lakukan di negeri yang mulai saat ini menjadi tanah air beliau. Beberapa orang kerabatnya dari Bani Najjar telah datang menemuinya, sementara beberapa orang dari bani Amr mengawal beliau dari Quba'. Yang membawa rombongan mencapai seratus orang.⁸²

Setelah selesai shalat Nabi Muhammad menunggangi Qashwa' begitu pula Abu Bakr dan para sahabat dari kalangan Quraisy lainnya dan berangkat bersama beliau menuju kota. Di sayap kanan dan kiri disertai pasukan berpakaian perang dengan pedang terhunus. Mereka adalah

⁸¹ Ibid., 53.

⁸² Martin Lings, *Muhammad Kisah Hidup Berdasarkan Sumber Klasik* terj. Qomaruddin (Jakarta" PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 188.

orang-orang Aus dan Khazraj, sebagai bentuk penjagaan dan pengwalan serta mereka menunjukkan bahwa janji mereka melindungi Nabi Muhammad bukanlah omong kosong belaka, meskipun betul-betul sadar, bahwa saat itu maupun nanti, Nabi Muhammad tidak sepenuhnya memerlukan perlindungan apapun. Tidak pernah ada hari yang penuh kebahagiaan seperti itu.⁸³

“selamat datang wahai Nabi Allah, selamat datang wahai Nabi Allah”, begitulah kira-kira luapan kebahagiaan dan kegembiraan yang diserukan ulang-ulang oleh laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berbaris disepanjang jalan. Qashwa memperlambat langkah beliau dengan langkah yang begitu anggun dan mengesankan. Setelah Rasulullah menaiki kendaraannya dan berangkat dari perkampungan bani Salim menuju Madinah, penduduk Anshar yang dilewati beliau menyambutnya dengan berseru-seru, “kemarilah Ya Rasulullah, kami memiliki pasukan, persenjataan, dan perlindungan yang baik”. Mereka rebut Tarik menarik tali unta beliau. Kemudian Rasulullah berkata “biarkan unta itu, karena ia berjalan dengan perintah Allah.” Seluruh penduduk Madinah keluar untuk menyambut kedatangan beliau, jalan-jalan penuh sesak oleh mereka, bahkan ada yang naik keatas atap rumahnya, kaum wanita, anak-anak, dan lelaki semuanya berseru, “Allahu akbar Rasulullah telah datang, Allahu akbar Rasulullah telah tiba...”⁸⁴

⁸³ Ibid., 188.

⁸⁴ Ibid,

Sementara itu anak-anak menabuh rebana dan melantukan lagu.

Bulan purnama telah terbit di atas kita

Setelah sekian lama berpisah

Kita wajib bersyukur

Selama masih ada orang yang menyeru kepada Allah

Wahai orang yang diutus untuk kita

Engkau datang membawa perintah yang harus ditaati

Engkau datang dan menerangi Madinah

Selamat datang wahai dai terbaik.

Rasulullah melanjutkan perjalanannya menarobos kerumunan orang-orang pada hari bersejarah hingga perjalanan unta Rasulullah berakhir didekat rumah Abu Ayyub al-Anshari. Unta itu berhenti untuk sesaat, dan Rasulullah mengendurkan tali kendalinya, unta tersebut lantas melompat dan terus berjalan ke tempat yang tidak jauh dari situ, ia kemudian menunduk dan melenguh, Abu Ayyub kemudian menuntun unta tersebut dan menempatkannya dirumahnya, pertanda bahwa Rasulullah telah menemukan tempat untuk bermukim, yakni kediaman Abu Ayyub⁸⁵.

Setelah Rasulullah menetap di Madinah, terdapat beberapa program kerja yang beliau lakukan salah satunya ialah membuat perjanjian atau sebuah konstitusi kenegaraan yang bernama Piagam Madinah.

⁸⁵ Ibid., 189.

Piagam Madinah merupakan landasan awal dalam pemerintahan Islam yang mencerminkan tentang ijtihad Nabi Muhammad di dalam bidang sosial, politik dan masyarakat. Dalam mengatur masyarakat Nabi Muhammad tidak sepenuhnya mendapat bimbingan wahyu. Sebab pada saat Piagam Madinah dikonsepsi dan ditetapkan pada tahun 622. Ayat-ayat Madaniyah sebagai ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat belum banyak turun di awal tahun Hijriah tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan bertauhid dan beribadah yang secara detail mendapat wahyu dari Allah SWT sebagaimana ayat-ayat Makkiyah, sedangkan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan Nabi Muhammad lebih banyak berijtihad, baik berpikir secara individu maupun dengan bermuswarah bersama dengan para sahabat. Tidak jarang beliau meninggalkan pendapatnya sendiri dan mengambil pendapat para sahabat.⁸⁶

Piagam Madinah juga merupakan sejarah pertama dalam konstitusi Islam dalam mencapai consensus bersama dalam masyarakat yang majemuk dan plural. Sungguh merupakan inisiatif dan ketetapan Nabi Muhammad dalam rangka mengorganisir dan mempersatukan umat manusia sebagai umat yang satu (Ummat Wahidah).⁸⁷

Hal ini didukung oleh isi konten yang terdapat dalam teks shahifah dimana dalam teks tersebut mengakomodir dan memuat segala keragaman

⁸⁶ Cholis Nafis, *Piagam Madinah Dan Deklarasi HAM Studi Historis Dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralism Beragama* (Jakarta Selatan: Jagaksara, 2015), 6.

⁸⁷ Ibid., 7.

penduduk Madinah. Diantaranya memuat tentang keadilan, perdamaian, penegakan hukum, persatuan, keadilan dan yang paling penting konstitusi Negara Madinah adalah memuat kemerdekaan yang sangat fundamental dalam diri manusia, yakni kemerdekaan berbudaya dan bertradisi, kemerdekaan dari kekurangan, kemerdekaan dari penindasan, kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan dalam memeluk agama. Karena itu prinsip kemerdekaan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat yang pluralistic. Sebab kemerdekaan ini merupakan nilai-nilai asasi dalam diri manusia, yang dengan kemerdekaan seseorang merasa diangkat eksistensinya dan merasa dihargai identitasnya.⁸⁸

Dokumen tersebut dimulai dengan rumusan

“Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Inilah sebuah risalah dari Muhammad, antara orang-orang beriman dan orang-orang islam yang berasal dari Qurasy dan Yatsrib (Yaitu Madinah) dan orang-orang yang mengikuti mereka dan menggabungkan diri dengan mereka dan berjuang bersama mereka. Mereka itu satu ummat yang berbeda dari masyarakat lain”.

Sembilan pasal berikutnya, menyebutkan Sembilan puak atau kelompok orang, dan menyatakan bahwa masing-masing mengemban tanggung jawab atas kesalahan salah seorang anggota yang tertawan. Kelompok pertama yang disebutkan adalah Muhajirin Quraisy, para pengikut Nabi Muhammad dari Makkah, delapan lainnya adalah puak-puak Arab, atau kelompok puak-puak, tiga dari Aus dan lima dari Khazraj.

⁸⁸ Ibid., 7.

Adapun pasal-pasal selanjutnya, sekitar dua puluh lima pasal membicarakan tentang berbagai aspek hubungan antara kaum mukminin dengan yang lainnya, dan terhadap masyarakat yang tidak beriman. Sedangkan lima belas pasal berikutnya mengemukakan hak-hak dan kewajiban orang-orang Yahudi. Beberapa kelompok Yahudi disebutkan, tetapi kebanyakan tidak disebutkan karena sudah dijadikan satu dan digabungkan bersama dengan kelompok Arab.⁸⁹

2. Isi Piagam Madimah.

كتاب النبي

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص. م الجزء الثاني ص ١١٩-١٣٣ لابن هشام (أبي محمد عبد الملك) المتوفى سنة ٣١٤ هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

١

أنهم أمة واحدة من دون الناس.

٢

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم أخذ الدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٣

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طا نفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

⁸⁹ W Montgomery Watt, Muhammad Nabi dan Negarawan, (Jakarta: Cv Kuning Mas, 1984), hal 67.

٤

وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٥

وبنو الحرث على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٦

وبنو جشم على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٧

وبنو النجار على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٨

وبنو عمرو بن عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٩

وبنو النبيت على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

١٠

وبنو الأوس على ربتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

١١-١٢

ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

١٣

وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين و أن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.

١٤

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

١٥

وأن ذمة الله واحدة يحيد عليهم أديانهم و أن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس.

١٦

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليه.

١٧

وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

١٨

وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.

١٩

وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وأن المؤمنين والمتقين على أحسن هدي وأقومه.

٢٠

وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

٢١

وأن من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى والى المقتول وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

٢٢

وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من ينصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

٢٣

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صل الله عليه وسلم.

٢٤

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادموا محاربين.

٢٥

وأن يهود بني عوف مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتخ إلا نفسه وأهل بيته.

٢٦

وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

٢٧

وأن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف.

٢٨

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

٢٩

وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.

٣٠

وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

٣١

وأن اليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتخ إلا نفسه وأهل بيته.

٣٢

وأن جفنة بطن ثعلبة كأنفسهم.

٣٣

وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الاثم.

٣٤

وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.

٣٥

وأن بطانة يهود كأنفسهم.

٣٦

وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد صل الله عليه وسلم وأنه لا ينحجر على ثار جرح وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وأن الله على أبر هذا.

٣٧

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وأنه لم يأتهم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم.

٣٨

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادموا محاربين.

٣٩

وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

٤٠

وأن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم.

٤١

وأنه لا يجار حرمة إلا بإذن أهلها.

٤٢

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة واشتجار يخاف فساده. فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صل الله عليه وسلم وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

٤٣

وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها.

٤٤

وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

٤٥

وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فإنهم يصلحونه ويلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين الأمن حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم

٤٦

وان اليهود الأوس مواليهم وأنفسهم مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة وأن البر دون الاثم.

٤٧

ولا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صل الله عليه وسلم.

Berikut terjemahannya :

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang "Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan Orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka"

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Quraisy ttp mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima wang tebusan darah (diyat) kerana suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 3

1. Banu 'Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan darah (diyat). 2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 4

1. Banu Sa'idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka.
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 5

1. Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 6

1. Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 7

1. Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

Pasal 8

1. Banu 'Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 9

1. Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 10

1. Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (tha'ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.



Pasal 11

Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggungjawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 12

Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13

1. Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 14

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

Pasal 16

Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17

1. Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu
2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19

1. Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan.
2. Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
2. Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21

1. Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).
2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22

1. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
2. Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23

Apabila timbul perbezaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad

SAW.

Pasal 24

Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25

1. Kaum Yahudi dari suku 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
4. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26

Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 27

Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 28

Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 29

Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas

Pasal 30

Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf

di atas

Pasal 31

1. Kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari

Banu 'Awf di atas

2. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32

Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah

Pasal 33

1. Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

2. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34

Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

Pasal 35

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

Pasal 36

1. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW
2. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya
3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri
4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini

Pasal 37

1. Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara
2. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini
3. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa
4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya
5. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya

Pasal 38

Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi

Pasal 39

Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini

Pasal 40

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah

Pasal 41

Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya

Pasal 42

1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW

2. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Pasal 43

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka

Pasal 44

Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib

Pasal 45

1. Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai

2. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)

3. Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu

Pasal 46

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu 2. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan

X PENUTUP

Pasal 47

1. Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya
2. Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya
3. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah
4. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman
5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah
6. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)

7. Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya⁹⁰

3. Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam piagam Madinah.

a. Pluralisme.

Sejarah mengungkapkan bahwa Rasulullah berhasil mewujudkan persatuan Yatsrib dan meletakkan dasar organisasi politik dengan mengadakan perjanjian bersama pihak Yahudi atas landasan kebebasan dan persekutuan yang cukup kuat. Rasulullah selalu mengadakan tali silaturahmi dengan mereka dan berkomunikasi dengan para pembesar Yahudi.⁹¹

Di dalam Piagam Madinah secara eksplisit tertulis nama sejumlah golongan dan suku. Rasulullah tampaknya mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi dan politik kelompok-kelompok tersebut. Karena pada mulanya masing-masing kelompok hidup secara terpisah, maka tidak ada persatuan diantara mereka, dan mereka tidak memiliki pemerintahan yang membawahi berbagai kelompok itu. Tiap suku merupakan badan yang berdiri sendiri, terpisah dari suku lain. Rasulullah kemudian menempatkan diri sebagai pemimpin

⁹⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 12-24

⁹¹ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 235.

di Madinah, ditengah-tengah sejumlah suku yang mengakui beliau sebagai pemimpin masyarakat. Beliau berhasil menciptakan sebuah bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan, sebagai suatu perwujudan dari gagasan besar, berupa prinsip kehidupan nasional di Arabia.⁹²

Kebijakan Rasulullah tertuang dalam Piagam Madinah mengandung mengandung makna yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Pada pasal pada pasal 1 dinyatakan “mereka satu umat , berbeda dari yang lain. Sedangkan pasal 15 menyebutkan “perlindungan Allah yang satu.” Pasal 16 menentukan “orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan bantuan.” Pasal 24 menyebutkan “Yahudi bani Auf satu umat bersama kaum muslimin.”⁹³

Masyarakat yang mendukung piagam ini jelas memperlihatkan karakteristik yang majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan Arab non-muslim.⁹⁴ Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Rasulullah dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural. Piagam ini dibuat sebagai salah satu siasat beliau untuk

⁹² Ibid., 256.

⁹³ Ibid., 256.

⁹⁴ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 58.

membina kesatuan hidup berbagai golongan di Madinah.⁹⁵ Oleh karena itu dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan sebagainya.⁹⁶

Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Rasulullah membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Selanjutnya membangun persaudaran yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas pada umat Islam saja.⁹⁷

b. Demokrasi

Implikasi dari piagam Madinah adalah pelaksanaan musyawarah atau demokrasi. Aplikasi musyawarah dalam Islam dipelihatkan secara jelas oleh Rasulullah selaku kepala negara di Madinah. Bahkan Rasulullah telah menjadika prinsip musyawarah ini sebagai dasar system dalam pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahan, segala aspek keputusan tidak terpusat ditangan beliau. Untuk mengambil satu keputusan politik misalnya. Dalm beberapa kasus Rasulullah

⁹⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI-Press, 1995) 3.

⁹⁶ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 254.

⁹⁷ *Ibid.*, 245.

melakukan konsultasi-konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Fakta historis membuktikan betapa seringnya beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.⁹⁸

Munawwir Sjadzalu mencatat ada empat cara yang ditempuh Rasulullah dalam mengambil suatu keputusan . *Pertama*, mengadakan musyaarah dengan sahabat senior. *Kedua*, meminta pertimbangan kalangan professional. *Ketiga*, melemparkan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat kedalam forum yang lebih besar. *Keempat*, mengambil keputusan sendiri.⁹⁹

c. Hak Asasi Manusia.

M. Abdullah mengemukakan dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah yang tidak terdapat dalam negara manapun kecuali negara yang didirikan atas dasar agama. *Pertama*, kebebasan beragama. *Kedua*, pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan, asas yang melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga negara.¹⁰⁰

⁹⁸ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 319.

⁹⁹ Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 16-17.

¹⁰⁰ Muhammad Abdullah, *Islam Djalan Mutlak* (Jakarta: pembangunan, 1923), 12.

Sebagai contoh nyata, dapat kita lihat pada masa Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kaum Ansar waktu itu menerima kedatangan saudaranya Muhajirin dengan tangan terbuka, dan bahkan mereka ada yang memberikan sebagian harta untuk menolong saudaranya yang telah meninggalkan semua harta bendanya demi menjaga keutuhan iman dari rongrongan kaum musyrik Mekkah.¹⁰¹

Implementasi dari prinsip persamaan hak pada masa itu, antara lain juga terlihat ketika Rasulullah memilih dan mengangkat orang-orang seperti Salman Al-Farisi muslim non-arab dan Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Padahal ketika itu cukup banyak sahabat dari kalangan Quraisy yang pantas menduduki posisi tersebut sebagaimana panglima perang.¹⁰²

Dalam Islam, secara substansial, konsep Hak Asasi Manusia bukanlah barang baru, konsep HAM dalam Islam lebih awal dalam Islam daripada konsep lainnya. Namun, istilah HAM itu memang belakangan, namun, kalau substansi HAM yang kita maksudkan, maka HAM dalam Islam jauh lebih dahulu dibandingkan dengan *Magna Charta*, HAM dalam Islam lebih awal 600 tahun. Piagam Madinah misalnya, pokok-pokok pikirannya yang mencakup maslaah:

¹⁰¹ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 359.

¹⁰² Ibid. 359.

- a) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga .
- b) Saling membantu dan menghadapi musuh bersama.
- c) Membela mereka yang teraniyaya.
- d) Menghormati kebebasan beragama.

Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan konsep dan asas HAM Piagam Madinah yang dikorelasikan dengan HAM kontemporer sebagai berikut. *Pertama*, manusia adalah sama, dalam segala kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, adanya hak hidup bagi setiap individu manusia. *Ketiga*, kebebasan beragam bagi pemeluk agama. *Keempat*, adanya persamaan hak bagi setiap orang di muka hukum dan di ranah politik. Keempat konsep tersebut sesuai dengan HAM yang dirumuskan barat, namun apa yang dirumuskan Piagam Madinah ini terlebih dahulu dirumuskan di abad ke 14 sebelum barat merancanganya, yaitu dengan adanya hak hidup, yang dapat kita lihat dengan adanya diat sebagai pengganti *qisas*. Dan juga adanya persamaan diantara setiap manusia, ini karena manusia berasal dari satu ayah yaitu nabi Adam.¹⁰³

¹⁰³ Ibid., 361.



BAB IV

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PIAGAM MADINAH DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pendidikan Multikultural dalam pendidikan Nasional

1. Pengertian, visi, misi, dan tujuan pendidikan Nasional

menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut lahirlah pendidikan Nasional di Indonesia. Yang mana pendidikan Nasional berarti pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada undang-Undang dasar 1945. Untuk mewujudkan itu semua itu diperlukan sebuah system pendidikan yang merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan Nasional tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Nasional adalah pendidikan yang

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.

2. Visi Pendidikan Nasional

Dalam rangka menuju transformasi menuju masyarakat baru, visi pendidikan Nasional adalah *Pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila.*

Dengan ini pendidikan Nasional diharapkan mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang demokratis religious yang berjiwa mandiri, bermartabat, menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan, dan menekankan pada keunggulan sehingga tercapai kemajuan dan kemakmuran. Tujuan yang demikian mulia ini mempersyaratkan kepedulian keluarga, masyarakat, bersama-sama dengan organisasi dan institusi pendidikan Nasional yang mandiri, mampu untuk selalu melakukan inovasi menuju system pendidikan Nasional yang unggul.

Pengertian mandiri dalam rumusan tersebut mengandung arti sejumlah unsur penting, yaitu kemampuan (abilitas), sifat-sifat demokratis , toleran, kreatif, kompetitif, estesis, kritis, bijaksana dan bermoral. Dengan sejumlah sifat tersebut kemandirian harus pula diartikan sebagai dimilikinya kemampuan untuk berperan dalam tata

hubungan sistemik dan sinergik pada skala pendidikan nasional maupun global. Penerapan prinsip juga mengandung maksud bahwa keunggulan tersebut hanya dapat dilakukan secara efektif, dengan urutan prioritas, karena tidak mungkin semua sector diunggulkan.¹⁰⁴

3. Misi Pendidikan Nasional.

Mengingat betapa luasnya cakupan system pendidikan nasional, maka perumusan pendidikan Nasional akan dibedakan kedalam tiga misi, yaitu misi jangka pendek, jangka menengah, dan misi jangka panjang.. sasaran misi jangka pendek adalah pemulihan dari krisis (*crisis recovery*) yaitu:

- a. Melakukan penguatan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.
- b. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan sesuai dengan asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah.
- c. Melakukan perintisan program-program pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi jangka menengah adalah pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga terwujud kehidupan manusia dan masyarakat yang cerdas sebagai prasyarat bagi terciptanya masyarakat Madani. Yaitu: menciptakan system, iklim, dan proses pendidikan yang demokratis dan mengutamakan mutu, mampu mengembangkan

¹⁰⁴ Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 63.

manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran misi jangka panjang adalah terciptanya masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat Madani. Yaitu dengan melakukan pembudayaan dan pemberdayaan system, iklim, dan proses pendidikan nasional yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif nasional maupun global.

4. Tujuan Pendidikan Nasional

Sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, tujuan pendidikan haruslah mencerminkan kemampuan system pendidikan nasional untuk mengakomodasikan beberapa tuntutan peran yang multidimensional. Secara umum pendidikan harus menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan:

- a. Kepribadian yang kuat, religious, dan menjunjung tinggi budaya luhur bangsa.
- b. Kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
- c. Kesadaran moral hukum yang tinggi.
- d. Kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Spectrum tujuan pendidikan yang demikian luas yang disebutkan di atas yang sejalan dengan kemajuan masyarakat memerlukan penjabaran bagi pelaksanaannya pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.¹⁰⁵

B. Porsi dan Urgensi Pendidikan Multikultural dalam pendidikan Nasional.

Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*), hal ini dapat dilihat dari realitas yang ada. Bukti kemajemukannya juga dapat dibuktikan melalui semboyan Negara Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”. Masyarakat Indonesia yang plural dilandasi oleh berbagai perbedaan. Baik secara vertical maupun secara horizontal. Meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertical yakni perbedaan-perbedaan yang menyangkut lapisan atas dan bawah. Yakni dibidang ekonomi, sosial, ekonomi maupun budaya. Maka tidak mengherankan jika konflik seringkali bersumber dari kesalahpahaman antar kultur yang berbeda. Baik disebabkan perbedaan agama, etnis maupun strata sosial.

Atas dasar ini, maka pendidikan berwawasan multicultural menjadi sangat penting. Artinya pendidikan multicultural dimaksudkan

¹⁰⁵ Ibid, hal 67.

menjadi pendidikan alternatif yang memberi ruang bagi eksistensi, pengakuan, dan penghormatan kepada budaya-budaya lain.¹⁰⁶

Gema wacana pendidikan Multikultural berhembus sampai di Indonesia sejak tahun 2000, wacana tersebut mulai menggema sebagai media wacana, diselenggarakan berbagai diskusi, seminar dan workshop, yang kemudian disusul dengan penelitian dan penerbitan buku serta jurnal yang bertemakan multikultural.¹⁰⁷ Wacana pentingnya pendidikan Multikultural yang digemakan melalui berbagai symposium dan workshop tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam.

Problem tersebut disebabkan oleh adanya upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru, selama orde baru berkuasa, pemerintah mengabaikan terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, Bahasa, maupun budayanya. Semboyan “bhineka tunggal ika” pun diterapkan secara berat sebelah, artinya semangat ke-ika-an lebih menonjol daripada kebhinekaannya dalam pengelolaan negara Indonesia, pengelolaan negara dengan penekanan pada semangat ke-ika-an daripada kebhinekaan tersebut sangat mewarnai konsep dan praktik pendidikan di Indonesia.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sulalah, *Pendidikan Multicultural Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012), 1.

¹⁰⁷ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren* (T.P), 97

¹⁰⁸ Ibid., 97.

Konflik dan pertikaian terkadang tidak hanya terjadi pada masyarakat plural, namun juga terjadi pula pada masyarakat yang relative homogen. Meskipun masyarakat plural (heterogen) relative lebih sering mengalami konflik daripada masyarakat yang homogen. Pendidikan multicultural merupakan proses penanaman cara hidup untuk saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat . dengan pendidikan multicultural diharapkan muncul kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Pada konteks ini, diperlukan hadirnya pilar keempat untuk melengkapi pilar ketiga pilar lainnya yang menopang proses dan produk pendidikan nasional yaitu *how to live and work together with others*.

Lebih-lebih menghadapi tantangan global yang lebih beresiko.¹⁰⁹

Namun dalam beberapa decade terakhir. Indonesia mengalami fenomena kekerasan yang semakin sering terjadi, baik di daerah perkotaan misalnya tawuran antar pelajar dan perkelahian massal antar preman dan ormas, maupun di wilayah pedesaan seperti saling serang antar warga.

Demikian juga, kekerasan atau konflik atas nama agama dan etnis yang terjadi telah menggores citra Indonesia yang selama ini dianggap sebagai negara damai dan toleran. Banyak orang termasuk pemerintah, akademisim dan pengamat kemudian mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap sebagai pemicu memudarnya rasa cinta damai dan

¹⁰⁹ Ibid, hal 2.

toleran antar anak bangsa. Dari sejumlah analisis, banyak yang menengok kembali peran sentral pendidikan dalam kontribusinya mewujudkan Indonesia yang damai dan toleran. Dikursus tentang pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan menghargai keragaman dan kemajemukan semakin hangat diperbincangkan, baik dalam seminar-seminar maupun di media-media tulis dan televisi.¹¹⁰

Dari pemaparan tersebut kemudian muncul pertanyaan , Apakah cita-cita luhur bangsa Indonesia serta cita-cita dalam jangka menengah tahun 2020 sudah tergambar di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru itu? Lebih khusus lagi apakah di dalam undang-undang tersebut telah diberikan indikasi pengembangan pendidikan multicultural di Indonesia? Atau apakah undang-undang ini dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multicultural? Seperti yang kita lihat, pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan multicultural berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan di dalam suatu masyarakat dan negara.¹¹¹

Pertimbangan kependudukan seperti Kanada, pertimbangan ekonomi seperti yang mencuat di di Jerman dan Kanada. Perkembangan politik dan migrasi dari negara lain mencuat di Inggris, Kanada, USA. Pendidikan multicultural yang berdasarkan falsafah hidup kemanusiaan kita lihat sangat menonjol di Australia. Dari pengalaman-pengalaman negara tersebut kita lihat peranan undang-undang yang mengatur

¹¹⁰ Raihani, *Pendidikan Islam dalam masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 141.

¹¹¹ *Ibid.*, 141.

kehidupan bersama dari berbagai jenis bangsa (imigran) dalam jangka waktu yang cukup lama. Negara-negara tersebut mempunyai bukan hanya satu undang-undang atau pengaturan, tetapi berbagai undang-undang dan peraturan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.¹¹²

Apabila kita mencermati Undang-undang No.20 tahun 2003 maka tampak dengan jelas bahwa undang-undang tersebut belum mengatur mengenai pendidikan multicultural, jiwa dari Undang-undang tersebut adalah idealistic, bukan futuristic, undang-undang tersebut sangatlah idealistic karena mengupayakan perwujudan cita-cita luhur dari bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹¹³

Pada 2009, Raihani, seorang penulis buku pendidikan Islam dalam masyarakat multicultural, beserta Prof Lyn Parker dari The University of Western Australia dan Dr Chang Yau Hoon dari Singapore Management University mendapatkan *funding* dari Australia Research Council (ARC) untuk sebuah proyek penelitian yang mengkaji sejauh mana pendidikan di

¹¹² Ibid., 276.

¹¹³ Haar Tilaar, *Multikultural. Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional* (Jakarta, Grasindo, 2014), 276.

Indonesia membantu mewujudkan warga negara yang multicultural dan toleran. Proyek ini berdurasi selama tiga tahun dari 2009 sampai 2012. Secara individual, melakukan penelitian kualitatif terhadap enam sekolah yang berbeda di Yogyakarta dan Palangkaraya untuk mengeksplorasi apapun pendidikan yang berorientasi multicultural dengan menggunakan pendekatan *holistic* (menyeluruh), tidak hanya mendekati dari satu aspek atau komponen sekolah saja seperti kurikulum melainkan mencakup kebijakan pendidikan, kepemimpinan dan manajemen sekolah, budaya dan struktur sekolah, kegiatan kesiswaan, dan hubungan antar sekolah dan masyarakat.¹¹⁴

Pendekatan ini didasarkan pada anggapan pendidikan multicultural dapat dikategorisasikan ke dalam pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nilai, maka para ahli tampaknya sepakat bahwa internalisasi nilai kepada siswa hanya bisa dilakukan secara efektif apabila setiap elemen sekolah bergerak dengan “Bahasa” yang sama ke arah yang sama pula. Keceragaman ini untuk menghindari kebingungan-kebingungan pada siswa dalam menangkap pesan-pesan pendidikan dari setiap elemen sekolah.¹¹⁵

C. Rekonstruksionalisme Pendidikan

Pendidikan multikultural merupakan rekonstruksionalisme sosial. Rekonstruksi sosial artinya upaya melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya

¹¹⁴ Ibid., 142.

¹¹⁵ Ibid., 142.

rasa kedaerahan, identitas kesukuan, *the right to culture* dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan sehingga tidak jarang menyebabkan pergeseran-pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya. Rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralistis. Konflik yang muncul di beberapa daerah bukan saja mempunyai latar belakang ekonomi, sosial-budaya agama, dan adat istiadat.¹¹⁶

Memang pergeseran-pergeseran sosial tersebut merupakan sesuatu yang lumrah karena tidak dikenal sebelumnya. Masing-masing komunitas menutup dirinya sendiri dan mempunyai suatu persatuan semu yang dipaksakan dari atas. Kita lihat sebenarnya didalam pendidikan multikultural tidak ada pengelompokan-pengelompokan komunitas yang mengagungkan nilai-nilai kelompok sendiri tetapi yang mengenal akan nilai-nilai hidup budaya suku/komunitas yang lain. Oleh sebab pendidikan multikultural tidak akan dikenal dengan adanya fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama, karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula didalam pendidikan multikultural tidak mengenal adanya *xenophobia*.¹¹⁷

Pendidikan multikultural terutama didalam masa transisi dewasa ini memang mempunyai tugas yang tidak ringan. Pertama-tama

¹¹⁶ Haar Tilaar, *Multikultural. Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta, Grasindo, 2014), 188..

¹¹⁷ Ibid., 198.

pendidikan multikultural bertugas untuk memperdalam akan rasa identitas kesukuan yang kemudian secara terbuka mengenal dan mengerti akan nilai-nilai sosial-budaya dan agama dari suku lain. Pada tahap berikutnya ialah penghargaan yang sama terhadap system nilai dari masing-masing suku., mengetahui dan menghargai kelebihan-kelebihannya dan membatasi diri dari kemungkinan *clash* dari system nilai yang berbeda. Akhirnya pendidikan multikultural sebagai suatu rekonstruksi sosial mempunyai tugas dalam mewujudkan kebudayaan Indonesia yang sedang menjadi atau konsep keindonesiaan yang bersatu di atas pluralitas suku-suku yang beragam.¹¹⁸

Berbicara tentang rekonstruksi sosial sejenak kita pelajari apa arti dari sebuah rekonstruksi, lebih-lebih rekonstruksi sosial masyarakat melalui pendidikan. Rekonstruksionalisme dalam Bahasa Inggris *reconstruct* yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionalisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Menurut Noor Syam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang teraganggu oleh kehancuran, kebingungan dan kesimpangsiuran.¹¹⁹

¹¹⁸ Ibid., 189.

¹¹⁹ Ali Mubin, “pengaruh filsafat rekonstruksionalisme terhadap rumusan konsep pendidikan”, *Rausyan Fikr*, 1 (Maret 2018), 70.

Meskipun demikian prinsip yang dimiliki oleh aliran ini tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran filsafat perenialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan. Aliran perenialisme memilih caranya tersendiri yakni dengan kembali ke dalam kebudayaan lama (*regressive road culture*) yang mereka anggap paling ideal. Sementara itu aliran rekonstruksionalisme menempuhnya dengan jalan berupaya membina suatu consensus yang paling luas mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia.¹²⁰

Aliran rekonstruksionalisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas seluruh umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat dan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Disamping itu, aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasi oleh golongan tertentu. Cita-cita yang sesungguhnya tidak hanya sekedar teori, tetapi mesti diwujudkan menjadi kenyataan sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa

¹²⁰ Ibid., 70.

membedakan warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama, dan masyarakat yang bersangkutan.¹²¹

Teori pendidikan rekonstruksionisme yang dikemukakan oleh Brameld yang dikutip dalam makalah filsafat rekonstruksionalisme karya Awaluddin dan kawan-kawan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012) terdiri atas 5 tesis, yaitu: Pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita, dan selaras dengan mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi, dan sosial masyarakat modern. Sekarang peradaban menghadapi kemungkinan penghancuran diri. Pendidikan harus mensponsori perubahan yang benar dalam nurani manusia. Oleh karena itu, kekuatan teknologi yang sangat hebat harus dimanfaatkan untuk membangun umat manusia, bukan untuk menghancurkannya. Masyarakat harus diubah bukan melalui tindakan politik, melainkan dengan cara yang sangat mendasar, yaitu melalui pendidikan bagi para warganya, menuju suatu pandangan baru tentang hidup dan kehidupan mereka bersama.¹²²

Masyarakat banyak harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, dimana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh muridnya sendiri. Semua yang mempengaruhi harapan dan hajat masyarakat, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, industri, dan sebagainya, semuanya akan menjadi tanggung jawab rakyat, melalui

¹²¹ Ibid., 70.

¹²² Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 169.

wakil-wakil yang dipilih. Masyarakat ideal adalah masyarakat demokratis, dan harus direalisasikan secara demokrasi. Struktur, tujuan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata aturan baru harus diakui merupakan bagian dari pendapat masyarakat.

Anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Menurut Brameld, kaum progresif terlalu sangat menekankan bahwa kita semua dikondisikan secara sosial. Perhatian kaum progresif hanya untuk mencari cara dimana individu dapat merealisasikan dirinya dalam masyarakat, dan mengabaikan derajat dimana masyarakat telah menjadikan jati dirinya. Menurut rekonstruksionisme, hidup beradab adalah hidup berkelompok, sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah. Pendidikan merupakan realisasi dari sosial (social self realization). Melalui pendidikan, individu tidak hanya mengembangkan aspek-aspek sifat sosialnya melainkan juga belajar bagaimana keterlibatan dalam perencanaan sosial.

Guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana dengan cara memperhatikan prosedur yang demokratis. Guru harus melaksanakan pengujian secara terbuka terhadap fakta-fakta, walaupun bertentangan dengan pandangan-pandangannya. Guru menghadirkan beberapa pemecahan alternatif dengan jelas, dan ia memperkenalkan siswa-siswanya untuk mempertahankan pandangan-pandangan mereka sendiri.

Cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini, dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial. Yang penting dari sains sosial adalah mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai, dimana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal.

D. Implementasi Pendidikan multicultural Piagam Madinah dalam pendidikan Nasional

Pada bab terakhir ini saya akan memaparkan inti dari sebuah penelitian yang sudah panjang lebar saya jelaskan diawal, bahwa maksud dan inti dari penelitian ini ialah mengambil kembali ibrah, atau manfaat yang terjadi dimasa lalu untuk kemudian diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Yakni sebuah konsep multicultural yang dibangun oleh Nabi SAW yang mampu merangkul berbagai jenis perbedaan baik dari segi kegi kepercayaan, budaya, ras dan lain lain untuk kemudian bisa saling bertoleransi antara satu dengan yang lain agar supaya bisa diterapkan lagi di Indonesia.

Peneliti mengibaratkan Madinah sama dengan Indonesia, yakni sebuah tempat yang menampung berbagai perbedaan sebagai jati diri dan identitas dari tempat tersebut. Disatu sisi menguntungkan, oleh karena tempat tersebut baik Madinah maupun Indonesia menjadi berwarna dengan adanya keberagaman tersebut. Namun ibarat pisau bermata dua, disamping menguntungkan ada pula efek negative jika keberagaman

tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, yaitu munculnya rasisme, pertarungan antar etnis atau suku, pendiskreditan minoritas maupun berbagai kesenjangan sosial yang lain.

Negara kita memiliki slogan “bhineka tunggal ika” mencerminkan adanya pluralism dan multikultural di dalamnya yang mampu merajut persatuan dan kesatuan bangsa, namun fakta dilapangan tidak seutuhnya sama dengan slogan agung tersebut. Banyaknya konflik karena sentimental agama dan budaya kerap kali dijumpai yang menghambat cita-cita mulia tersebut, perbedaan agama dan keragaman kultural belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya. Bahkan sebaliknya justru menambah panjang daftar benturan dan konflik ditengah masyarakat.

Konflik sangat dipengaruhi kondisi sosial atau sifat masyarakat. Konflik bisa diartikan sebagai disungsi dalam system sosial. Sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa secara sosiologis waktu itu Madinah terdiri dari tiga kelompok besar masyarakat dengan tradisi dan ideologinya masing-masing, merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi Nabi Muhammad yang telah berhasil membangun masyarakat harmoni dalam kemajemukan seperti itu, apalagi sebagai pendatang baru, sebelum kedatangan beliau, Madinah sering dilanda perang hingga menelan banyak korban, namun semenjak Piagam Madinah lahir konstitusi tersebut mampu menjadi resolusi konflik bagi masyarakat Madinah. Dalam Piagam Madinah Rasulullah juga berhasil mengembangkan pola pengelolaan interaksi multicultural secara baik sekali, di sisi lain secara sosiologis

Indonesia memiliki kemiripan dengan Madinah, baik itu secara etnis, keyakinan maupun kepercayaan.¹²³

Resolusi konflik yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW terasa masih amat sangat relevan untuk digunakan sebagai pola interaksi konflik di Indonesia. Selain merupakan jalan yang familiar dalam budaya Indonesia juga karena Indonesia memiliki penduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu harusnya penduduk Muslim di Indonesia menjadi inisiator dalam segala resolusi konflik terkait keberagama. Bukan malah menjadi biang atau dalam daripada sebuah keributan yang membuat heboh negeri ini. Dengan begitu prinsip-prinsip perdamaian yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sejak ribuan tahun lalu dapat dijadikan landasan sekaligus inspirasi masyarakat muslim Indonesia khususnya untuk menjadi panutan tentang bagaimana cara menanggapi keberagaman.¹²⁴

Untuk menanamkan sikap-sikap pluralis dan kondisi harmonis yang selama ini berjalan. Tentunya dengan memaksimalkan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Karena pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk kehidupan publik, selain itu juga diyakini mampu memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk politik dan kultural. Dengan demikian pendidikan sebagai

¹²³ Mu'adil Faizin, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik di Indonesia", Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 1 (1 Januari-July, 2017), 83.

¹²⁴ M. Agus Nurmyanto, *Mazhab Pendidikan Kritis Menyingkapi Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 81.

media untuk menyiapkan dan membentuk kehidupan sosial, sehingga akan menjadi institusi yang sarat akan nilai-nilai idealisme.¹²⁵

Sekolah adalah skala kecil atau miniatur dari kehidupan bermasyarakat, lembaga inilah yang kemudian menjadi salah satu upaya pemberian pemahaman akan nilai-nilai multicultural. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan usaha yang secara sengaja dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian siswa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan pendidikan diperlukan untuk menumbuhkan kembangkan kearifan multicultural dan kesadaran global siswa. Agar nantinya mereka mampu berperan merawat kemajemukan dan mendayagunakan untuk meraih kemaslahatan hidup bersama, serta mampu menyikapi secara tepat arus globalisasi. Pemahaman siswa memberikan pencerahan pada masyarakat saat proses interaksi.

Terkait hal tersebut Rahmatias Jusuf mengemukakan bahwa Pendidikan berbasis multicultural harus dapat memberikan pemahaman tentang keberadaan masyarakat plural yang membutuhkan ikatan-ikatan keadaban, yang berupa pergaulan antar budaya yang diikat oleh suatu peradaban. Tentu saja ikatan tersebut dibangun oleh nilai-nilai universal kemanusiaan, yang ditransfer kepada masyarakat untuk mewujudkan

¹²⁵Ibid., 81.

budaya yang luhur, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tertib, berwibawa, dan bermartabat. Untuk dapat memahami pendidikan multicultural perlu dipahami karakteristik budaya dan wilayah budaya. Pemahaman terhadap karakteristik budaya antara lain meliputi budaya sebagai suatu hal yang general sekaligus sebagai sesuatu yang spesifik. Disamping itu budaya juga merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, sebagai suatu symbol, sebagai milik bersama, sebagai atribut individu, budaya juga sebagai suatu model, dan budaya sebagai suatu yang bersifat adaptif. Kesadaran multicultural juga didorong oleh perkembangan arus globalisasi yang berdampak pada perjumpaan lintas budaya dan agama berlangsung amat intens.¹²⁶

1. Pendidikan demokratis.

Hal yang mendasar dari sebuah nilai-nilai yang dapat diambil dari Piagam Madinah adalah demokrasi, menjadikan Piagam Madinah sebagai model bagi perkembangan demokrasi di dunia Islam khususnya di Indonesia merupakan sebuah negosiasi, adaptasi yang tentu dapat disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang berkembang pada masyarakat setempat, terutama sebagai jembatan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Karena secara substantive, salah satu pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah ialah konsep musyawarah, dari sini kemudian demokrasi menemukan momentumnya dalam tradisi Islam. Mereka yang

¹²⁶ Komaruddin Hidayat, "Merawat Keberagaman Budaya" dalam Tonny D. Widiastono (ed.), *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 89.

menerima demokrasi pada dasarnya berlandaskan atas pandangan musyawarah untuk mufakat. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan.¹²⁷

“hendaklah kalian bermusarah dalam setiap perkara” (Qs, As-Syura:38).¹²⁸

di dalam ayat lain juga disebutkan

“maafkanlah dan ampunilah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam memecahkan setiap masalah” (Qs. Ali Imran:159).¹²⁹

Dari ayat yang mengandung perintah musyawarah tersebut, maka sesuai dengan apa yang terkandung di dalam salah satu pasal Piagam Madinah yaitu pasal 23 yang menyatakan:

“jika diantara kalian muncul perselisihan tentang suatu masalah, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah swt dan dikonsultasikan dengan Muhammad SAW”.¹³⁰

Dari ayat di atas dapat di Tarik disimpulkan bahwa demokrasi merupakan gagasan/pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Secara absolut dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi langsung ada ditngan rakyat, sedangkan secara material demokrasi merupakan corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan kesamaan, misalnya kemerdekaan dalam berfikir dan mengemukakan pendapat, berapat dan berkumpul untuk memecahkan suatu persoalan,

¹²⁷ Fitri Hamdani, “Pigam Madinah dan Demokrasi di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013), 6.

¹²⁸ Al-Qur'an, 42:38

¹²⁹ Ibid., 3:159

¹³⁰ Fitri Hamdani, “Pigam Madinah dan Demokrasi di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013), 10.

kemerdekaan dalam mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah.

Demokrasi sejati membutuhkan hukum, peraturan, lembaga yang menegakkannya, dan sikap demokratis. Sikap demokratis di dalamnya terkandung kebesaran hati untuk mengakui kesalahan, kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan masyarakat luas, dan mampu mengkombinasikan semangat untuk menegakkan pendiriannya serta kompromi dengan kesadaran bahwa seseorang tidak dapat mewujudkan semua yang diinginkan, kombinasi antara kesadaran individu dan kelompok. Secara substantif berdimensi panjang untuk mendidik warga negara yang baik guna terciptanya masyarakat demokratis, maka dari itu pendidikan demokratis atau istilah lain menyebutkan demokratisasi pendidikan mutlak diperlukan.¹³¹

Di dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-undang No.2 tahun 1989 yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sector pendidikan, sebagaimana tersurat oada oasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang

¹³¹ Teguh Sihono, "Upaya Menuju Demokratisai Pendidikan", Universitas Negeri Yogyakarta, (1 April, 2011), 4.

berarti demokrasi pendidikan merupakan implikasi dari kebijakan yang mendorong pengelolaan sector pendidikan daerah, yang implementasinya berada di tingkat sekolah.¹³²

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga negara masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan adanya tiga hal, yakni pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak negara, kedua, demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak dapat langsung begitu saja meniru dari masyarakat lain, ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi (kebebasan, persamaan, dan keadilan, serta loyal kepada system politik yang bersifat demokratis.¹³³

Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian, melalui pendidikan anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan . pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak sekolah haruslah dikembalikan menjadi milik si anak lagi, anak harus dianggap, dinilai, didampingi, dan diajar sebagai anak, bukan sebagai orang tua mini, atau prajurit mini, melainkan sebagai anak yang diberikan kesempatan untuk bebas sesuai

¹³² Ibid., 4.

¹³³ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: Logung pustaka, 2005), 51.

dengan kapasitas nya sebagai seorang anak. Dengan demikian proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.¹³⁴

Demokratisasi pendidikan disekolah dan di masyarakat harus didukung secara berkelanjutan agar pendidikan nasional dapat diselenggarakan secara demokratis untuk semua warga negara Indonesia. Maka, pemerintah tidak boleh mengesampingkan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, atau antara pendidikan di pusat kota dengan pendidikan dipelosok desa.¹³⁵

Pendidikan harus mengikuti tuntutan local, nasional maupun internasional. Sehingga pendidikan nasional dapat menuju kepada kemandirian, keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹³⁶

Terlaksananya demokratisasi pendidikan antara guru dan murid merupakan subjek utama bagi proses demokratisasi, pendidikan disekolah, karena sekolah sebagai sarana pengembangan sikap demokrasi, maka kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan gagasan, kemampuan hidup bersama dan keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan perlu diperhatikan oleh sekolah, terutama dengan berlakunya undang-undang system pendidikan nasional pasal 13 ayat 1 yang memberikan kebebasan mendapatkan pendidikan agama kepada setiap peserta didik sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan

¹³⁴ Siti Yulaikah, "Demokratisasi Pendidikan, Analisis Tentang Fenomena Pendidikan Anak Orang Miskin Di Desa Karangpoh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2006", (Skripsi, STAIN SALATIGA, Boyolali, 2006), 22.

¹³⁵ Ibid., 22.

¹³⁶ Ibid., 22.

oleh pendidik yang seagama. Meskipun Tidak dapat diingkari bahwa mewujudkan sekolah demokratis tidaklah mudah, ada beberapa alasan tentang sulitnya membangun system demokrasi disekolah, pertama, filsafat dan anggapan dasar pendidikan yang masih menganggap anak didik sebagai tabularasa, yaitu kertas kosong yang harus diisi oleh pendidik, kedua, metode pengajaran yang masih tertumpu pada konsep banking system.

ketiga, bahan pelajaran yang masih banyak berasal dari buku atau beberapa praktikum bidang sains, kurang menggali dari persolan masyarakat. Keempat, sikap guru yang indoktrinatif, kelima suasana sekolah yang tidak memungkinkan guru, siswa, sekolah, orang tua dan masyarakat untuk membicarakannya. Ketujuh, kegiatan belajar siswa yang berpusat dilingkungan sekolah, tidak memanfaatkan masyarakat di luar sekolah sebagai tempat belajar anak didik.¹³⁷

Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah pemantapan prioritas pendidikan dasar Sembilan tahun, pemberiam beasiswa dengan sasaran yang strategis, pemberian intensif guru yang bertugas di wilayah terpencil, pemantapan peran SD kecil dan SLTP erbuka, penggalakan Kejar Paket A dan B, pemantapan system pendidikan terpadu untuk anak yang mempunyai kelainan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat agar menunjang pendidikan untuk semua (*education for all*). Demikian pula agar lebih bermakna, pemerataan pendidikan tidak

¹³⁷ Ibid, hal 23.

hanya bernuansa kuantitatif. Ke dalam strategi perluasan dan pemerataan. Kesempatan pendidikan ini termasuk pengembangan pendidikan alternative, sebagai wahana aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat. Tidak kalah pentingnya adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan islam perlu di posisikan kembali sehingga tidak kehilangan karakternya sebagai wahana pendidikan yang populis dan berperan besar dalam memperkaya pendidikan nasional.¹³⁸

2. Pendidikan Pluralisme

a. Definisi pluralisme.

Di dalam Piagam Madinah salah satu pasalnya mengajarkan manusia untuk saling menerima perbedaan dalam segi agama, di pasal-pasal awal yang ada di dalam Piagam Madinah bermakna pengakuan terhadap berbagai jenis etnis dan agama di Madinah, hak dan kewajiban mereka (non muslim) tidak ada yang berbeda dengan hak dan kewajiban umat muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa semua orang yang berada di Madinah baik itu muslim, yahudi, maupun agam paganisme tidak ada yang di spesialkan diantara mereka, semuanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pasal-pasal Piagam Madinah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

¹³⁸ Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan dalam konteks otonomi daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal 90-91.

dalam pasal 3 yang berbunyi “ sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berutang karena membayar uang tebusan darah dengan baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.” Pun demikian yang tertuang dalam pasal 14 yang berbunyi “tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya lantaran seseorang yang tidak beriman”.

Namun sebelum membahas hal tersebut lebih mendalam, sejenak kita perlu mengetahui makna dari pluralisme, secara Bahasa pluralisme (Bahasa Inggris pluralism), terdiri dari dua kata, yakni plural yang (beragam) dan isme (paham) yang bisa diartikan sebagai beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham.¹³⁹

Sedangkan secara istilah, pluralisme berarti sesuatu yang lebih dari satu, pengertian pluralisme dalam konteks ini mencakup pengertian: pertama, keberadaan sejumlah kelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari ras, agama, pilihan politik dan kepercayaan yang berbeda: kedua, pluralisme berarti prinsip bahwa kelompok –kelompok yang berbeda ini bisa hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat.

Pluarlisme juga mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang merupakan salah satu pilar demokrasi.

¹³⁹ Yahya Al-Mustaufi, *Ajaran Sang Wali, Pemikiran Gus Dur Dari Tasawuf Hingga Demokrasi* (Jombang, Pustaka Al-Khumul, 2014), 84.

Tidak ada demokrasi sejati tanpa adanya pluralisme, pluralisme dalam konteks ini berarti adanya perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Pluarlisme semacam ini bermakna membangun toleransi, yang mengharuskan adanya pengakuan bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing memiliki hak yang sama untuk sama-sama eksis. Karena itu, yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati dan bertoleransi aktif.¹⁴⁰

Dalam ilmu sosial pluralisme adalah sebuah kerangka, dimana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu dengan yang lain, mereka hidup bersama (konsistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi (percampuran).pluralisme juga dapat dikatakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat dalam pengembangan ekonomi.

Saat ini pluralisme menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan mendasar yang didefinisikan beberapa tokoh terkait pluralisme dengan pengertian awalnya, yaitu pluralism, sehingga memiliki beberapa arti yaitu.

¹⁴⁰ Umi Sumbulah, *Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 32.

- Pluralisme diliputi semangat religious, bukan hanya sosial.
- pluralisme juga digunakan sebagai alasan pencampuran antar ajaran agama antara
- pluralisme digunakan sebagai alasan untuk mengubah ajaran suatu agama dengan ajaran agama yang lain.

Pertentangan yang terjadi terkait definisi pluralisme semakin membingungkan karena munculnya kerancuan Bahasa, sebagaimana seseorang mengucapkan pluralisme dalam arti non asimilasi akan bingung jika bertemu dengan pluralisme dalam arti asimilasi, sudah semestinya muncul pelurusan pendapat agar tidak timbul kerancuan.¹⁴¹

pada tanggal 28 Juli 2015, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menerbitkan fakta yang melarang pluralisme. Dalam fata tersebut, pluralisme agama, sebagai obyek persoalan yang ditanggapi, dan di definisikan sebagai “ suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karena kebenaran setiap agama adalah relative, oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama lain salah, pluralisme juga

¹⁴¹ Yahya Al-Mustaufi, *Ajaran Sang Wali, Pemikiran Gus Dur Dari Tasawuf Hingga Demokrasi* (Jombang: Pustaka Al-Khumul, 2014), 87.

mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan hidup berdampingan disurga”.¹⁴²

Dengan demikian MUI menyatakan bahwa pluralisme dalam konteks yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran islam. Sedangkan bagi mereka yang mendefinisikan pluralisme non asimilasi, hal ini disalah pahami sebagai pelarangan terhadap pemahaman mereka, dan dianggap sebagai suatu kemunduran kehidupan berbangsa. Keseragaman memang bukan suatu pilihan yang baik bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bermacam ras, agama dan sebagainya, sementara di sisi bagi penganut definisi pluralisme asimilasi, pelarangan ini berarti pukulan bagi ide yang mereka kembangkan. Ide mereka untuk mencampurkan ajaran yang berbeda menjadi tertahan perkembangannya.¹⁴³

Disini hemat peneliti lebih memilih pluralisme yang cetuskan oleh M Yahya Al-mustaufi, yang berarti “ pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan yang dimaksud misalnya dari segi agama, suku, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Dari segi inilah biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam

¹⁴² Ibid., 87.

¹⁴³ Ibid., 87.

kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikan dan membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam suatu masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas.

Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, ras, yang memiliki aneka ragam budaya dan adat istiadat. Menerima kemajemukan, berarti menerima adanya perbedaan, menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa disana ada hal-hal yang tidak sama.¹⁴⁴

Menerima kemajemukan (dalam bidang agama misalnya) bukanlah berarti bahwa membuat “penggabungan gado-gado”, dimana kekhasan masing-masing terburai atau hilang, kemajemukan juga bukan berarti “tercampur baur” dalam satu adonan. Justru, di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan agama yang satu dengan yang lainnya tetap ada dan dipertahankan. Jadi, pluralisme berbeda dengan sinkretisme (penggabungan) dan asimilasi atau akulturasi (penyinkingan). Juga pluralisme tidak sama persis dengan inkulturasi (adaptasi terhadap kelompok masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, Bahasa, dan lain lain).¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ibid., 88.

¹⁴⁵ Ibid., 89.

b. pendidikan Pluralisme

masyarakat Indonesia dengan tingkat kemajemukan yang luar biasa tinggi, baik, etnik, budaya, ras, Bahasa, dan agama merupakan potensi sekaligus ancaman, berbagai konflik SARA yang telah disampaikan panjang lebar pada bab sebelumnya yang terjadi belakangan ini, sering dikaitkan dengan kegagalan bangsa ini memahami pluralitas. Secara spesifik pendidikan juga dituding telah gagal dalam menjalin keragaman itu melalui pendidikan yang melampaui sekat-sekat agama.

Lebih celaka lagi, pendidikan agama yang seharusnya dapat menjadi wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif pluralis, selama ini malah cenderung menampilkan wajahnya yang eksklusif dan dogmatis, akhirnya cita-cita luhur untuk mencapai masyarakat yang majemuk dan harmonis, dimana ada perbedaan dan keanekaragaman budaya mampu berfungsi sebagai sumber daya yang memperkaya manusia dan peradaban, hingga kini masih menjadi impian. Mencermati realita tersebut, pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pluralisme dalam pendidikan Nasional, terutama bagi bangsa Indonesia yang majemuk bukan tanpa alasan, mengingat urgensi dan realita

masyarakat Indonesia yang majemuk, maka sebuah konsep tentang pendidikan pluralisme tersebut mutlak diperlukan.¹⁴⁶

Kalau kita melacak referensi tentang pendidikan pluralisme, banyak sekali literature mengenai pendidikan tersebut atau sering dikenal orang dengan sebutan pendidikan multicultural. Namun literature-literatur tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam pengertian istilah, mengartikan pendidikan pluralisme sebagai *any set of process by which school work with rather than against oppressed group*.

Banks. Dalam bukunya yang berjudul *Multicultural education: Historical Development, dimension and practice* menyatakan bahwa meskipun tidak ada consensus tentang itu, beliau berkesimpulan bahwa diantara banyak pengertian tersebut maka dimunan pengertiannya ialah, pendidikan multicultural sebagai pendidikan untuk *people of color*, pengertian-pengertian semacam ini, menurut Hasan Hamid, jelas tidak sesuai dengan pendidikan di Indonesia, kaena memiliki konteks budaya yang berbeda dari USA walaupun keduanya memiliki bangsa yang multikebudayaan.

Lebih jelasnya, menariklah kalau kita memperhatikan suatu definisi tentang pendidikan pluralisme yang disampaikan oleh Frans Magnéz Suseno, (dalam suara pembaruan, 23 September

¹⁴⁶ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: Logung pustaka, 2005), 89.

2000), yaitu “suatu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama, sehingga kita mampu melihat “kemanusiaan” sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita.”¹⁴⁷

Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas.” Senada dengan hal tersebut, Ainurrofiq Dawam (*op.cit*:100), menjelaskan definisi pendidikan pluralisme (multicultural) sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku dan aliran (agama).¹⁴⁸

c. Tujuan pendidikan pluralisme.

secara umum pendidikan pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran nomatif teologis, tetapi juga kesadaran sosial, dimana kita hidup ditengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan keragaman sosial lainnya. Karena itu pluralisme bukanlah sebuah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis, Frans Magniz Susesno memberikan catatan penting yang patut dikaji oleh masyarakat beragama, bahwa tantangan agama bahwa tantangan agama-agama dimasa mendatang ialah merebaknya konflik agama, disinilah arti

¹⁴⁷ Ibid., 91.

¹⁴⁸ Ibid., 92.

penting pendidikan pluralisme sebagai jembatan untuk meminimalisasi dan mengakhiri konflik tersebut. Maka, kita perlu mengubah mindset (kerangka berfikir) yang masih keliru. Menjalin kerukunan antar komunitas beragama dalam negara yang mempunyai kemajemukan budaya dan agama menjadi kebutuhan yang mendesak, untuk itu kita mesti belajar untuk duduk bersama, saling mendengar dan bertukar pikiran, baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim.

Upaya mencairkan kebekuan wacana pluralisme juga bisa dipercepat dengan jalan mengintensifkan pendidikan pluralisme dan multikultural di sekolah-sekolah. Karena lembaga pendidikan adalah media yang paling tepat untuk mereparasi mindser seseorang.¹⁴⁹

seorang guru besar Filsafat islam menuturkan, bahwa melalui pendidikan pluralisme, seorang murid bisa diantarkan untuk dapat memandang pluralitas keIndonesiaannya dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama sebagai kekayaan spiritual bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga kelestariannya. Jika tidak maka ke Indonesiaan itu sendiri yang akan menjadi taruhannya (Media Indonesia, 1 Desember 2000). Akhirnya dengan model pendidikan pluralisme seperti ini diharapkan memberikan dorongan terhadap terciptaan perdamaian

¹⁴⁹ Sapendi, “Pendidikan pluralisme agama, membangun hunungan sosial lintas agama disekolah”, *STAIN Pontianak*, 2, (september 2012), 166.

dan upaya menanggulangi konflik yang akhir-akhir ini marak, sebab nilai dasar dari pendidikan pluralisme adalah penanaman dan pembumian nilai toleransi, empati dan simpati, dan solidaritas sosial.

Meskipun untuk merealisasikan tujuan pendidikan pluralisme seperti itu, peneliti berkeyakinan bahwa dalam proses pendidikan perlu memerhatikan konsep *unity in diversity*. Disertai suatu sikap dengan tidak saja mengandaikan suatu mekanisme berfikir terhadap agama yang tidak *monointerpertable*, atau menanamkan kesadaran bahwa keragaman dalam hidup merupakan suatu kenyataan, tetapi juga memerlukan kesadaran bahwa moralitas dan kebajikan bisa saja lahir dalam konstruk agama-agama lain. Tentu saja, penanaman konsep seperti ini dengan tidak mempengaruhi kemurnian masing-masing agama yang diyakini kebenarannya oleh peserta didik.¹⁵⁰

d. Kurikulum pendidikan pluralisme.

Untuk merealisasikan tujuan dan fungsi yang dapat menumbuhkan sikap pluralisme pada peserta didik, menurut UNESCO (1981), pendidikan sekolah harus membekali para mahasiswa atau peserta didik dengan kerangka (*frame work*) yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya. Karena masyarakat kita majemuk,

¹⁵⁰ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: Logung pustaka, 2005), 99.

maka kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis, dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis antara satu dengan yang lain, dan menghormati hak orang lain.

Demi terealisasinya kurikulum tersebut, untuk memerhatikan kurikulum sebagai proses, ada empat hal yang perlu diperhatikan gurudalam mengembangkan kurikulum sebagai proses ini, yaitu:

- 1) Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar.
- 2) Cara belajar siswa yang ditentukan oleh kebudayaannya.
- 3) Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa.
- 4) Lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.

Amin Abdullah memiliki pandangan bahwa, untuk membentuk pendidikan yang mampu menumbuhkan pluralisme di masa depan, ia lebih menyarankan perlunya rekonstruksi pendidikan sosial keagamaan untuk memperteguh dimensi sosial keagamaan dalam pendidikan agama. Maksudnya, kalau selama ini praktik di lapangan, pendidikan agama masih menekankan sisi keselamatan dimiliki dan didambakan oleh orang lain diluar diri dan kelompoknya sendiri- jadi materi pendidikan agama lebih

berfokus dan sibuk mengurus urusan untuk kalangan sendiri (*individual* atau *private affairs*). Maka, pendidikan agama perlu direkonstruksi kembali, agar juga menekankan pada proses edukasi sosial, tidak semata-mata individual dan untuk memperkenalkan konsep *sosial-contract*.

sehingga pada diri peserta didik tertanam suatu keyakinan bahwa, kita semua semenjak semula memang berbeda-beda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, iman, kredo, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan kepentingan kehidupan bersama, mau tidak mau kita harus rela untuk menjalin kerja sama dalam bentuk kontrak sosial antar sesama kelompok masyarakat.

3. Pendidikan Humanistik

a. Definisi Humanistik.

Hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam islam adalah; Persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Dalam islam memnyerukan kepada ketiganya tersebut. Menempatkannya dalam gambaran yang nyata, dan melindunginya dengan akidah dan syariatnya dengan kuat, dengan tidak hanya mencantumkan dalam hukum-hukum sebagai syair, melainkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari umatnya. M Abadullah mengemukakan dua asas yang sangat mendasar dala Piagam Madinah, yang tidak terdapat di negara manapun kecuali negara

yang didirikan dengan dasar agama, *pertama*, kebebasan beragama, *kedua*, adalah asas yang mendasarinya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan, asas yang melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga negara.¹⁵¹

Dalam Islam, secara substansial, konsep Hak Asasi Manusia bukanlah barang baru, konsep HAM dalam Islam lebih awal dalam Islam daripada konsep lainnya. Namun, istilah HAM itu memang belakangan, namun, kalau substansi HAM yang kita maksudkan, maka HAM dalam Islam jauh lebih dahulu dibandingkan dengan *Magna Charta*, HAM dalam Islam lebih awal 600 tahun. Piagam Madinah misalnya, pokok-pokok pikirannya yang mencakup masalah:

- a) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga .
- b) Saling membantu dan menghadapi musuh bersama.
- c) Membela mereka yang teraniyaya.
- d) Menghormati kebebasan beragama.

Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan konsep dan asas HAM Piagam Madinah yang dikorelasikan dengan HAM kontemporer sebagai berikut. *Pertama*, manusia adalah sama, dalam segala kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, adanya hak hidup bagi setiap individu manusia. *Ketiga*, kebebasan beragam bagi pemeluk agama. *Keempat*, adanya persamaan hak bagi setiap orang

¹⁵¹ Rahmad Asril Pohan, *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), 356.

di muka hukum dan di ranah politik. Keempat konsep tersebut sesuai dengan HAM yang dirumuskan barat, namun apa yang dirumuskan Piagam Madinah ini terlebih dahulu dirumuskan di abad ke 14 sebelum barat merencangkannya, yaitu dengan adanya hak hidup, yang dapat kita lihat dengan adanya diat sebagai pengganti *qisas*. Dan juga adanya persamaan diantara setiap manusia, ini karena manusia berasal dari satu ayah yaitu nabi Adam.¹⁵²

Dalam kebebasan beragama dan hormat-menghormati antar pemeluk agama terwujud dalam kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, serta persamaan hak dalam lingkup politik, semua warga masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari penganiyayaan.¹⁵³

b. Pendidikan humanistic

Menerawang sosok manusia dan peradaban masa depan adalah keniscayaan untuk menggamitkannya dengan eksistensi anak-anak sebagai pelanjut generasi, berikut akses dan prakarsa pembinaan dan pengembangannya, nampaknya kita sepakat bahwa pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta peningkatan terhadap anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

¹⁵² Ibid., 361.

¹⁵³ Ibid., 361.

Keteladanan orang tua adalah niscaya disini, bahkan sejak anak dalam kandungan kondisionalitas telah dimulai dalam bentuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan mempertinggi mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, serta ketentraman keluarga pada umumnya.

Dalam konteks ini, paling tidak mengisyaratkan dua muatan, yakni muatan filosofis dan muatan operasional praktis, muatan filosofis bersinggungan dengan perbincangan tentang eksistensi manusia dalam pendidikan Islam, sedangkan muatan operasional praktisnya berkenaan dengan bagaimana menciptakan suatu proses pendidikan yang bermuara pada kegiatan dan tujuan yang sacral-transendental, yaitu memanusiaikan manusia.¹⁵⁴

Islam sebagai system ilahi yang paripurna (QS Al-Maidah [5]:3) melihat manusia sebagai satu kesatuan antara jia dan raga. Dengan demikian, manusia dapat dikatakan manusia apabila kedua unsur tersebut sama-sama ada, jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka tidak dapat disebut sebagai manusia lagi, jiwa tanpa raga bukan manusia, melainkan ruh yang bergentayangan. Demikian juga raga tanpa jiwa bukanlah manusia, melainkan mayat. Raga dan jiwa merupakan satu kesatuan yang membentuk mahluk bernama manusia, jiwa merupakan dimensi ruhaniah, sedangkan raga adalah dimensi jasmaniah manusia, keduanya adalah substansi

¹⁵⁴ Baharuddin dan Muh Makin, *Pendidikan Hmuanistik* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), 111.

manusia. Kedua unsur ini merupakan unsur asal yang adanya tidak terikat satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari ruh, juga sebaliknya.¹⁵⁵

Pendidikan Islam sebagai suatu system sekaligus proses bermaksud membina, mengembangkan, mengembangkan, dan mengarahkan potensi dasar insaniyah (jasmaniyah-ruhaniyah) berdasarkan nilai-nilai normative ajaran Islam. Karena Islam sendiri memandang manusia sebagai satu kesatuan yang integral antara jasmaniyah dan ruhaniyah.¹⁵⁶

pendidikan Islam pada hakikatnya ingin mengembangkan dan mengarahkan potensi tersebut secara seimbang. Maka dari itu, bisa dikatakan misi Islam dan pendidikan Islam sangatlah mulia, yaitu memanusiakan manusia dalam artian menjadikan manusia yang ideal baik dari aspek kecerdasan intelektual (kognitif), kecerdasan psikologis (afektif), dan kecerdasan mekanik/otot (psikomotorik). Misi Islam dan pendidikan harus benar-benar terwujud atau terimplementasi kedalam realitas kehidupan sosial sehingga system tatanan sosial akan tercipta rasa saling menghargai, menghormati, damai, rukun tanpa ada konflik diantara sesama.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Ibid., 111.

¹⁵⁶ Ibid., 111.

¹⁵⁷ Mukhamad Saekan, "Ideologi Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam" (STAIN Kudus, Jawa tengah, 1 Februari 2017), 143.

Problem kehidupan bangsa Indonesia adalah problem kemanusiaan, yaitu kurangnya rasa saling menghormati , saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mudah dipicu konflik sosial,. Pendidikan Islam yang memiliki peran humanistic harus mampu memberikan solusi atau terapi kemanusiaan agar tercipta rasa aman, nyaman, dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Terapi terhadap problem perlu diawali dari asumsi atau cara pandang yang tepat terhadap eksistensi manusia sehingga muncul metode atau teknik dalam membimbing dan membina manusia dengan tabiat atau hakikat manusia yang sempurna.¹⁵⁸

Disinilah urgensinya perlu ditemukan ideologi kemanusiaan dalam pendidikan Islam untuk menjamin terwujudnya realitas pendidikan dan masyarakat yang damai, toleran dan anti kekerasan. Maka untuk itulah Pendidikan Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional bangsa Indonesia harus mampu memberikan pencerahan dalam mewujudkan karakteristik manusia dalam kehidupan sosial.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ibid., 145.

¹⁵⁹ Ibid., 145.

c. Tujuan pendidikan Humanistik

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan humanistik/kemanusiaan adalah suatu cara pandang dan cara berfikir terhadap eksistensi manusia dengan segala variasi atau kebhinekaan yang dimiliki sehingga melahirkan komitmen pelaksanaan pendidikan untuk mencapai keberhasilan secara maksimal. Ideologi selalu melekat dalam diri pelaku atau pelaksanaan pendidikan, artinya selama manusia hidup maka selama itu pula akan melahirkan sebuah ideologi. Ideologi kemanusiaan menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan karena pendidikan dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia (humanisasi) yang memiliki komitmen dan target mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan menjadi lebih baik. Dari proses tersebut diharapkan manusia memiliki kesuksesan dalam kehidupan sosialnya.¹⁶⁰

Pendidikan Islam jelas memiliki target untuk melakukan perubahan baik yang bersifat individual maupun sosial untuk mewujudkan tatanan system kehidupan yang penuh kebermaknaan. Besarnya unsur kemanusiaan dalam pendidikan berimplikasi kepada perhatian yang besar pula terhadap aspek-aspek kemanusiaan yang ada dalam diri manusia. Artinya pendidikan akan dapat dikatakan berhasil apabila diperhatikan atau dilihat dari

¹⁶⁰ Ibid., 144.

perspektif kemanusiaan. Esensi manusia memiliki berbagai potensi, memiliki beragam keinginan, memiliki multi persepsi dan rasa yang harus dilihat, dibimbing, dilihat dan dikembangkan sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai manusia. Mendidik manusia tidak bisa disamakan dengan memproduksi bahan bangunan rumah, membimbing manusia juga tidak bisa dibandingkan dengan memperbaiki kendaraan dalam sebuah bengkel. Mendidik adalah proses memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia.¹⁶¹

Berkaitan dengan pendidikan humanistic, Arthur Combs menjelaskan tentang tujuan dari sebuah pendidikan humanistic.

Beliau memaparkan bagaimana persepsi ahli-ahli psikologi dalam memandang tingkah laku. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang terpenting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya, untuk mengerti orang lain, yang penting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Menurut Combs belahar terjadi apabila memiliki arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Combs menyatakan bahwa

¹⁶¹ Ibid., 144-145.

tingkah laku yang menyimpang adalah akibat yang tidak ingin dilakukan, tetapi dia tahu bahwa harus melakukan.¹⁶²

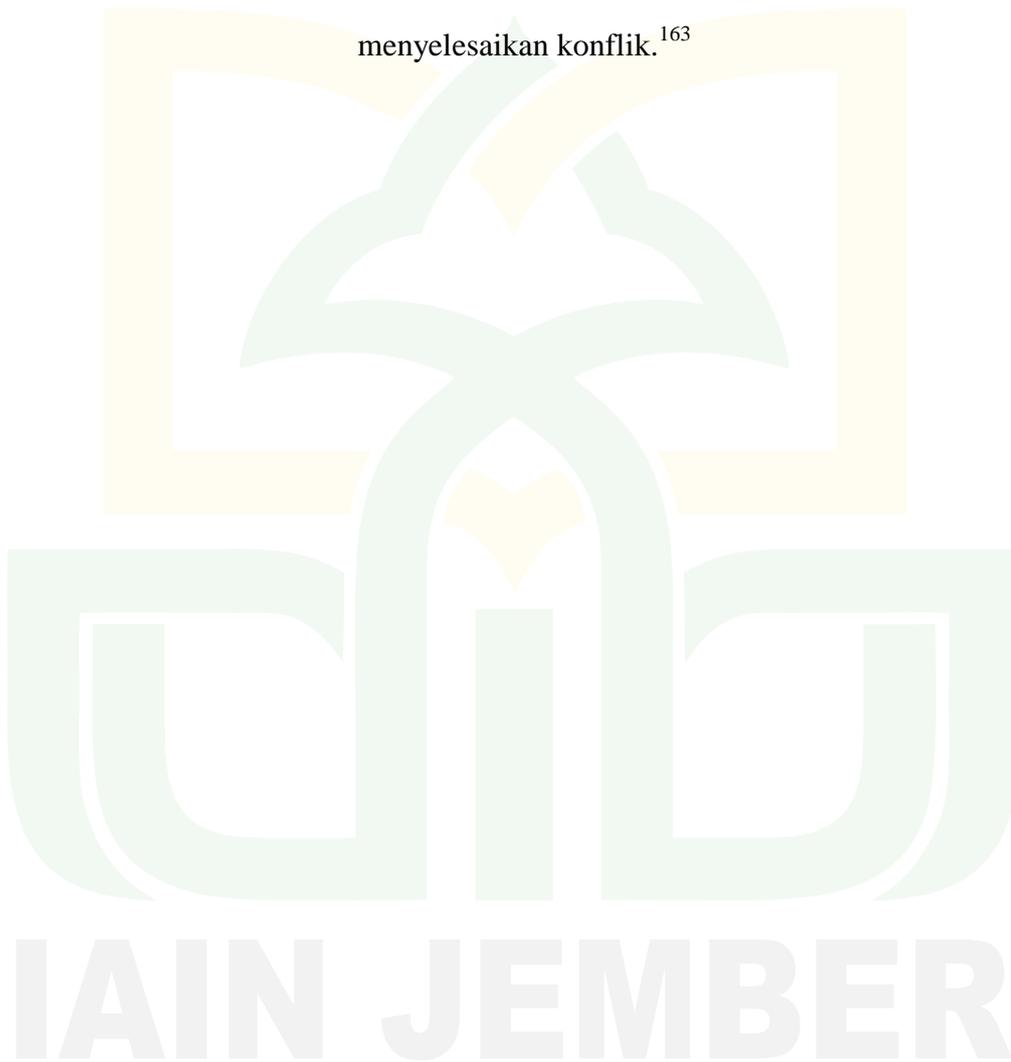
Combs berpendapat bahwa banyak guru yang membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. . akan tetapi pembelajaran itu tidak bermakna pada siswa, sehingga yang penting ialah membawa siswa untuk memperoleh makna bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkan dengan kehidupannya.

Tujuan pendidikan humanistic menurut combs:

- a) Menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa.
- b) Memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri bahwa mereka mampu.
- c) Memperkuat perolehan keterampilan dasar (akademik, pribadi, antarpribadi, komunikasi, dan ekonomi).
- d) Memutuskan pendidikan secara pribadi dan menerapkannya.
- e) Mengenal pentingnya perasaan manusia , nilai, dan persepsi dalam proses pendidikan.

¹⁶² Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta:Grasindo, 2006), 181.

- f) Mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung , menyenangkan, serta bebas dari ancaman.
- g) Mengembangkan siswa tentang ketulusan, respek, menghargai orang laun. Dan terampil dalam menyelesaikan konflik.¹⁶³



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengibaratkan Madinah sama dengan Indonesia, yakni sebuah tempat yang menampung berbagai perbedaan sebagai jati diri dan identitas dari tempat tersebut. Disatu sisi menguntungkan, oleh karena tempat tersebut baik Madinah maupun Indonesia menjadi berwarna dengan adanya keberagaman tersebut. Namun ibarat pisau bermata dua, disamping menguntungkan ada pula efek negative jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, yaitu munculnya rasisme, pertarungan antar etnis atau suku, pendiskredtan minoritas maupun berbagai kesenjangan sosial yang lain maka dari itu peneliti menyimpulkan dua hal dalam penelitan ini.

- a. Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi perdamaian yang tertulis pertama di dunia, yang memiliki nilai-nilai pendidikan multikultural di dalamnya untuk membina dan mengelola masyarakat yang majemuk, nilai-nilai tersebut peneliti menyimpulkan terdapat 3 nilai. Yaitu: pluralism yang berarti Piagam Madinah mengakui realitas penduduk Madinah majemuk dalam hal kepercayaan (agama), yang kedua demokrasi. Dimana asas dasar dalam pemerintahan Rasulullah yang tertuang dalam Piagam Madinah yaitu

musyawarah sebelum mengambil keputusan apapun. Dan yang ketiga adalah perlindungan Hak Assasi manusia. Dimana tujuan inti dari piagam Madinah ialah menjaga hak hidup setiap anggotanya untuk sama-sama memperoleh hak kemanan dan kedamaian

- b. Ketiga nilai tersebut (pluralisme, demokrasi, dan HAM) amat sangat relevan untuk kemudian diterapkan di dalam Pendidikan Nasional. Mengapa, karena struktur masyarakat Indonesia tidak jauh berbeda dengan komposisi masyarakat Madinah waktu itu. Kemajemukan dan heterogenitas merupakan identitas yang menempel pada bangsa Indonesia, untuk itu ketiga nilai tersebut jika di implementasikan dalam pendidikan nasional diharapkan mampu untuk menopang segala perbedaan dan dapat menjadi pemahaman bagi peserta didik untuk bisa mengelola dan merawat kebhinekaan dengan baik.

B. Saran

Hasil penelitian ini sungguh banyak sekali kekurangan dan kekeliruan baik di dalam teknik penulisan maupun perihal konseptual pembahasannya, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti tunggu untuk bisa mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang ada. Sehingga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya, lebih-lebih jika dijadikan referensi dan bahan bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an in word

Buku

- Ahmad Abidin Zainal. 2014. *Piagam Madinah konstitusi tertulis pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Al-Mustauf Yahya. 2014. *Ajaran Sang Wali, Pemikiran Gus Dur Dari Tasawuf Hingga Demokrasi*. Jombang: Pustaka Al-Khumul.
- Bhaidawi Zakiyuddin. 2007. *pendidikan Agama berwawasan Multikultural*. Jakarta: Eirlangga.
- Baharuddin, Makin Muh. 2011. *Pendidikan Hmuanistik*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Darmaningtyas. 1999. *pendidikan dan setelah krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim. Sudarwan. 2003. *Agenda pembaruan Sistem Pendidikan Yogyakarta*: Pustaka pelajar.
- Djiwandono, Wuryani Sri Esti. 2006. *Psikologi Pendidian*. Jakarta:Grasindo.
- Ghony Djunaidi M, Aimanshur Fauzan. 2017. *metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Hafid Anwar dkk. 2015. *pendidikan multikulturalisme berbasis kearifan local*. Jakarta: KEMENDIKBUD.
- Tilaar H.A.R. 2014. *Multikultural Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Hasan M Iqbal. 2002. *pokok pokok materi metodologi penelitian*. Ghalia, Indonesia.
- Raco JR. 2010. *metode penelitian kualitatif, jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia.
- Jalal Fasli, Supriyadi Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

- Khan Ali Majid. 1987. *Muhammad SAW Rasul Terakhir*. Bandung : PUSTAKA
- Kartini. 2018. *Baiat perempuan Mukmin dalam Al-Qur'an, Skripsi*. Makassar, UIN ALAUDDIN.
- Ma'arif Syamsul. 2005. *Pendidikan pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung pustaka.
- Mahfud Choirul. 2004. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Maksum Ali, Ruhendi Yunan Luluk. 2004, *Paradigma pendidikan universal di era modern dan post modernism*, Yogyakarta: IRCiSod.
- Moelong, Lexy. J. 2002, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana Rohmat, 2004, *mengkulturasikan pendidikan nilai*, Bandung: Alfabeta.
- Nafis Cholis. 2015. *Piagam Madinah dan deklarasi HAM studi historis dan konseptual atas nilai-nilai pluralism beragama*. Jakarta Selatan: Jagaksara.
- Nafis Cholis. 2015. *Piagam Madinag dan deklarasi HAM*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nurmyanto Agus M. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis Menyingkapi Relasi Pengetahuan, Politik, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Pohan Asril Rahmad. 2014. *Toleransi Inklusif, Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah*. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA.
- Raihani. 2017. *Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- RITEDIKTI. 2019. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jendral Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.
- Romadhoni Ali. 2017. *Piagam Madinah Bukan Konstitusi Negara Islam*. Depok: liberatur Nusantara.
- Rumini Sukandar. 2012. *Metodologi Penelitian Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Ramayulis. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam mulia.
- Sawaun. 2009. *Hadis-Hadis Baiat Menurut Hizbut Tahrir*. Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Sadulloh Uyoh. 2006. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Shiddiqi Nouruzzaman. 1996. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siradj Said Aqil. 1999. *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Santri*. Jakarta : Pustaka Ciganjur.
- Sjadzali Munawwir, 1993. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- S Nasution. 2008. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surachman Wiranto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Dan Teknik*. Bandung: Tarsita.
- Sulalah. 2012. *Pendidikan Multicultural, Dialektika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Suryana Yaya, Rusdiana. 2015. *Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surur Muhammad Jamal al-Din. 1977. *Qiyam Al-Dawlah Al-'Arabiyyah Al-Islamiyah Fi Hayati Muhammad SAW*. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Soemanto Wasty, Soetopo Hendyat. 1982. *Dasar Dan Teori Pendidikan Dunia*. Malang: Usaha Nasional.
- Sonny Sumarsono. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sukardja Ahmad. 1995. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Beragama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI-Press.
- St. Rodliyah. 2013. *Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. Jember, STAIN Press.
- Syari'ati Ali. 1996. *Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Sumbulah Umi. 2013. *Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar 2012. Bandung: Citra Umbara.

- Watt W. Montgomery. 1984. *Muhammad Nabi dan Negarawan*. Jakarta: Cv Kuning Mas.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zed Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi. 2012. *Filsafat pendidikan islam*. Yogyakarta: Pustaka belajar.

Jurnal, tesis, skripsi dan lain-lain:

- Musthofa Indhra. 2015. *Pendidikan Multikultural prespektif Gus Dur*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Maghfiroh Nanda Rizal. 2016. *Nilai Pendidikan Multicultural Dalam Piagam Madinah Dan Pancasila Serta Relevansinya Terhadap PAI*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mukhamad Saekan. 2017. *Ideologi Kemanusiaan Dalam Pendidikan Islam*. STAIN Kudus: Jawa tengah.
- Rahmatias Jusuf. *Desain Pendidikan Multikultural Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran*.
- Komaruddin Hidayat. 2004. *Merawat Keberagaman Budaya*. dalam Tonny D. Widiastono (ed.). *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Fitri Hamdani. 2013. *Pigam Madinah Dan Demokrasi Di Indonesia*. Skripsi Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Teguh Sihono. 2011. *“Upaya Menuju Demokratisai Pendidikan”*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti Yulaikah. 2006. *Demokratisasi Pendidikan, Analisis Tentang Fenomena Pendidikan Anak Orang Miskin Di Desa Karangkopoh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2006*. Skripsi. STAIN SALATIGA: Boyolali
- Sapendi. 2012. *Pendidikan Pluralisme Agama, Membangun Hunungan Sosial Lintas Agama Disekolah*. STAIN: Pontianak.
- Rahmatias Jusuf. TP.*Desain Pendidikan Multikultural Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran*. TP.
- Teguh Sihono. 2011. *Upaya Menuju Demokratisai Pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Lailul Ibadil Hadi
Nim : T20151333
Fakultas /Jurusan/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PI/PAI
Tempat Tanggal Lahir : Jember 07 April 1997
Alamat : Dsn Krajan, Desa Sempolan, Kec Silo, Kab
Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“Implementasi Nilai Pendidikan Multikultural Piagam Madinah Dalam
Pendidikan Nasioanl”**

Adalah benar-benar karya saya asli, kecuali kutipan yang disebutkan
sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi
tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jember, 09 Januari 2020

Yang bertanda tangan



Moch Lailul ibadil Hadi

NIM T20151333

BIODATA PENULIS

Nama : Moch Lailul Ibadil Hadi
Nim : T20151333
Fakultas /Jurusan/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PI/PAI
Tempat Tanggal Lahir : Jember 07 April 1997
Alamat : Dsn Krajan

Riwayat Pendidikan formal:

- SDN SEMPOLAN 01 2003-2008
- MTS NURUR ROHMAN 2009-2012
- MA NURUR ROHMAN 2012-2015
- IAIN JEMBER 2015-2020

Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Nurur Rohma 2009-2015

IAIN JEMBER